



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASRI BUDI UTOMO**
2. Tempat lahir : Kudus
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/20 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panjang RT.04 RW.02 Kec. Bae, Kudus, Jawa Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asri Budi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023

Terdakwa Asri Budi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Asri Budi Utomo ditahan dalam tahanan rumah oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024

Terdakwa Asri Budi Utomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Advokat Tri Wulan Larasati, S.E., S.H., M.H., dan H. Budi Santoso, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ASRI BUDI UTOMO telah terbukti melakukan *tindak pidana dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong*

Halaman 1 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ASRI BUDI UTOMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa ASRI BUDI UTOMO sebanyak 2 X Nilai Kerugian Negara ($2 \times \text{Rp. } 338.722.968$) = 677.445.936,- (enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti seluruhnya (dari angka 1 sampai dengan angka 266 dalam daftar barang bukti) agar terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa ASRI BUDI UTOMO sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa dengan alasan-alasannya;
2. Memberikan Putusan yang ringan-ringannya terhadap Asri Budi Utomo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



KESATU

Bahwa terdakwa ASRI BUDI UTOMO, selaku Direktur C.V. ASTI JAYA berdasarkan Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 merupakan akte pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kantor C.V. ASTI JAYA di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Werguwetan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan, dan / atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa CV ASTI JAYA berdiri pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dengan susunan kepengurusan saat itu adalah ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur dan DWI PRASETIA FENDI sebagai Pesero Komanditer yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 2 sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 15 Mei 2013, CV ASTI JAYA menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bidang perdagangan dan bidang jasa selain bidang hukum dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 77306 dari Wajib Pajak CV ASTI JAYA adalah Kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil.
- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan usaha diwakili oleh pengurus yaitu terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA yang memiliki tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan, serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan yang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga baik didalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan komanditer.
- Bahwa sebagai badan usaha, CV ASTI JAYA telah terdaftar pada KPP

Halaman 3 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Kudus sejak 10 Juni 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Nomor Pengukuhan : PEM-0868/WPJ.10/KP.0803/2013 sehingga selayaknya terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kudus;

- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assessment*, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 antara lain adalah melaporkan SPT, PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;

- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CV ASTI JAYA telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian CV ASTI JAYA telah diberi kepercayaan oleh Negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV ASTI JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan SPT PPh Tahunan maupun SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

- Bahwa kegiatan usaha yang CV ASTI JAYA pada tahun 2017 yaitu:

- 1) Menyewakan Louder kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. SRA/SPK/016/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
- 2) Menyewakan tractor kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017.
- 3) Pengadaan ampas Awur (ampas tebu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat

Halaman 4 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. TAS/SPK/025/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. SRA/SPK/025/2017 tanggal 24 September 2017.

4) Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017.

5) Menyewakan truk untuk mengangkut tebu kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017,

6) Pekerjaan pengurangan (Borrow Material) jalan tol di Pemalang – Batang paket 4 dengan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk di Gedung WASKITA Jalan MT HARYONO Kav. No. 10, Cawang, Jakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. 34/SPK-SUB/WK/PBRT.4/2017 tanggal 04 Maret 2017.

7) Menyewakan Esavator kepada PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) di Subang akan tetapi Sewa tersebut tanpa ada perjanjian dan SPK karena insidentil dan dibayar tunai;

8) Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan pabrik Gula PT LAJU PERDANA INDAH di Pati.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha CV ASTI JAYA tersebut, dokumen yang menyertai penjualan dan penyerahan jasa adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK), invoice, faktur pajak, Rekapitulasi Tagihan dan Bukti pembayaran (transfer/bukti pembayaran) dan Rekening yang digunakan untuk menampung hasil penjualan dan jasa CV ASTI JAYA pada tahun 2017:

- Rekening BNI Cabang Kudus nomor 0503154461;
- Bank Jateng Cabang Kudus nomor 1024005794 ;
- BRI Cabang Kudus nomor 003801001735304

- Bahwa atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV ASTI JAYA berupa penyewaan alat berat dan penjualan ampas tebu dan grajen sebagai bahan bakar ketel di pabrik gula kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH, CV ASTI JAYA menerbitkan Faktur keluaran menerbitkan faktur

Halaman 5 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 dan memungut PPN sebesar 10% yaitu :

N O	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	01001717457 71044	14-Jul- 17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	425.000
2	03001717457 71047	01-Jun- 17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	96.599.853
3	03001717457 71048	10-Jul- 17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	56.460.238
4	01001717457 71030	07-Mar- 17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	3.552.500
5	01001717457 71031	07-Mar- 17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	5.177.500
6	01001717457 71010	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.947.500
7	01001717457 71011	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.999.800
8	01001717457 71012	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	7.191.600
9	01001717457 71013	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
10	01001717457 71014	'06- MAR-17	PERKEBUNA N	01.061.137.4- 051.000	6.384.000

Halaman 6 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NUSANTARA IX		
11	01001717457 71015	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.128.000
12	01001717457 71016	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.883.000
13	01001717457 71017	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
14	01001717457 71018	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.384.000
15	01001717457 71019	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.014.600
16	01001717457 71020	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	633.000
17	01001717457 71021	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	558.000
18	01001717457 71022	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.111.800
19	01001717457 71023	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	781.800
20	01001717457 71024	'06- MAR-17	PERKEBUNA N	01.061.137.4- 051.000	4.582.800

Halaman 7 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NUSANTARA IX		
21	01001717457 71025	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	972.600
22	01001717457 71026	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
23	01001717457 71027	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
24	01001717457 71028	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.567.500
25	01001717457 71029	'06- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.698.000
26	01001717457 71032	'16- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	14.926.250
27	01001717457 71033	'16- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	49.244.564
28	01001717457 71034	'16- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.612.000
29	01001717457 71035	'18- MAR-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	28.933.350
30	01001717457 71036	'13- APR-17	PERKEBUNA N	01.061.137.4- 051.000	35.965.959

Halaman 8 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NUSANTARA IX		
31	01001717457 71040	'05- JUN-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.403.850
32	01001717457 71042	'09- JUN-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.404.960
33	01001717457 71045	'01-JUL- 17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	10.499.600
34	01001717457 71046	'01-JUL- 17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	37.326.750
35	01001717457 71049	'05- AUG-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	3.078.000
36	01001717457 71050	'05- AUG-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.258.550
37	01001717457 71052	'27- OCT-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	16.373.140
38	01001717457 71055	'10- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	180.209.172
39	01001717457 71056	'10- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.483.870
40	01001717457 71057	'10- NOV-17	PERKEBUNA N	01.061.137.4- 051.000	6.940.270

Halaman 9 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			NUSANTARA IX		
41	01001717457 71058	'10- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	36.024.000
42	01001717457 71060	'13- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	26.234.820
43	01001717457 71061	'13- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	22.077.056
44	'0110171745 771059	'16- NOV-17	PERKEBUNA N NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.082.700
45	01001717457 71054	06- NOV-17	LAJUPERDAN A INDAH	01.571.859.6- 038.000	3.743.973
JUMLAH					748.815.925

- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak keluaran, atas transaksi yang dilakukan CV ASTI JAYA juga menerima pajak masukan dari pihak lawan (pihak kedua yang melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

N o.	NOFA	TGFA	MSP JK	NPWP_LW N	NAMA_LWN	PPN_L WN
1	0100011724 136455	01- MAR- 17	2017 03	0144608105 11000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.819.1 82
2	0100171782 459266	12- APR- 17	2017 04	0144608105 11000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.851.0 00
3	0100171741 937001	28- JUL-17	2017 07	0279905715 14000	GENDHIS MULTI MANIS	13.636. 364
4	0100011747 641558	01- AUG- 17	2017 08	7468229725 03000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.7 27
5	0100011747	09-	2017	7468229725	SEKAR BUMI	7.272.7

Halaman 10 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	641559	SEP-17	09	03000	PARAMA	27
6	0100011747 641562	01-NOV-17	2017 11	7468229725 03000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.7 27
7	0100201772 889127	23-NOV-17	2017 11	0279905715 14000	GENDHIS MULTI MANIS	7.158.0 36

- Bahwa setelah menerbitkan faktur pajak dan menerima pajak masukan kewajiban CV ASTI JAYA selaku wajib pajak adalah melaporkan SPT PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan akan tetapi terdakwa dengan sengaja menyampaikan pemberitahuan yang isinya tidak benar yaitu terdakwa menyampaikan SPT PPh Tahunan tahun 2017 yang isinya NIHIL padahal dalam kurun waktu tahun CV ASTI JAYA menerbitkan faktur pajak dan menerima pajak masukan dari pihak lain yang melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA dengan tujuan untuk menghindarkan dari kewajiban menyetor pajak yang telah dipungut yaitu :

Mas	BPS	P K	P M	KB/ (LB)	Tgl. Set or	Tgl. Lapo r
Jan	S- 01009016/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	17/02/2017
Feb	S- 01017680/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	31/03/2017
Mar	S- 01023174/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	28/04/2017
Apr	S- 01028085/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	26/05/2017
Mei	S- 01029397/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	07/06/2017
Jun	S- 05014426/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	13/07/2017

Halaman 11 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul	S- 05021787/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	18/08/2017
Agu	S- 05025046/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	13/09/2017
Sep	S- 05033699/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	31/10/2017
Okt	S- 05037484/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	20/11/2017
Nov	S- 05044401/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2017	0	0	0	-	29/12/2017
Des	S- 05002973/PPN1111/WPJ.10/K P.0803/2018	0	0	0	-	16/01/2018

- Bahwa dengan mengeluarkan Faktu pajak terdakwa selaku Direktur PT ASTI JAYA Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 melaporkan faktur pajak dalam SPT Masa PPN setiap bulan sesuai dengan jumlah faktur pajak yang dikeluarkan dan sesuai dengan jumlah setorann pajak yang dipungut dimana terhadap faktur pajak yang dikeluarkan terdakwa telah menyetorkan pajak yang dipungut tersebut dengan perincian sebagai berikut:

No	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	Novemb er	9152A479QL1TOV G2	4112/1110 0	25.250.81 3	20-Mar-18
2	Oktober	F295A477SUL07BG 2	4112/1110 0	16.373.14 0	20-Mar-18
3	Agustus	08C35476NVS1R4 G2	4112/1110 0	12.336.55 0	20-Mar-18
4	Juli	04975475IEF1VBG 2	4112/1110 0	47.826.35 0	20-Mar-18
5	Juni	4452F4B3U4DNG1 G2	4112/1110 0	1.403.850	20-Mar-18
6	April	32F484743SBB2BG 2	4112/1110 0	1.439.400	20-Mar-18
7	Maret	5A9BC4736FN00E	4112/1110	94.120.00	20-Mar-18

Halaman 12 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G2	0	0	
8	Juli	4D42E3UDAV8KUP	4112/1190	56.460.23	15-Agu-17
		7P	0	8	
9	Juni	466EA63SQ8Q8A6	4112/1190	96.599.85	17-Jul-17
		6P	0	3	
Jumlah				351.810.1	
				94	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor pajak yang telah dipungutnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp338.722.968,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Enam Delapan rupiah) sebagaimana Hasil pemeriksaan Ahli Penghitung Kerugian Negaradari KPP madya Semarang sebagai berikut :

URAIAN	MENURUT		KERUGIAN NEGARA (Rp)
	SPT/WP (Rp)	AHLI (Rp)	
PPN/ PPn. BM PPN Dalam Negeri			
1 Eksport	0	0	0
Peny. PPN-nya	0	7.488.159.250	7.488.159.250
2 dipungut sendiri	0	0	0
Peny. PPN-nya	0	0	0
3 digunggung	0	0	0
Peny. PPN-nya	0	0	0
dipungut	0	0	0
4 Pemungut	0	0	0
Peny. PPN-nya	0	0	0
5 tidak dipungut	0	0	0
Penyerahan	0	0	0
6 Dibebaskan PPN	0	0	0
Return	0	0	0
7 Penyerahan	0	7.488.159.250	7.488.159.250
Jumlah Penyerahan	0	748.815.925	748.815.925
1 Pajak Keluaran	0	0	0
PK dipungut	0	0	0
2 Pemungut PPN	0	0	0
PPN atas Return	0	0	0
3 Penyerahan	0	748.815.925	748.815.925
Pajak Keluaran Harus	0		
Dipungut			

Halaman 13 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pajak Masukan	0	0	0
1	Import			
	Pajak Masukan	0	58.282.763	58.282.763
2	Dalam Negeri			
3	PM MTS Import	0	0	0
	PM MTS Dalam	0	0	0
4	Negeri			
	Return	0	0	0
5	Pembelian			
	Kompen. PPN	0	0	0
	Masa	0	0	0
6	Sebelumnya			
7	Setoran	0	351.810.194	351.810.194
8	Lain-lain	0	0	0
	Jumlah Kredit Pajak	0	410.092.957	410.092.957
	PPN ymh. (Lebih)	0	338.722.968	338.722.968
	Dibayar			

-----Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa ASRI BUDI UTOMO, selaku Direktur CV ASTI JAYA berdasarkan Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 merupakan akte pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di kantor CV ASTI JAYA di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Werguwetan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus, dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa CV ASTI JAYA berdiri pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dengan susunan kepengurusan saat itu adalah ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur dan DWI PRASETIA FENDI

Halaman 14 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



sebagai Pesero Komanditer yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Wergu Wetan Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 2 sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 15 Mei 2013, CV ASTI JAYA menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bidang perdagangan dan bidang jasa selain bidang hukum dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 77306 dari Wajib Pajak CV ASTI JAYA adalah Kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil.

- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan usaha diwakili oleh pengurus yaitu terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA yang memiliki tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan, serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan yang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga baik didalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan komanditer.

- Bahwa sebagai badan usaha, CV ASTI JAYA telah terdaftar pada KPP Pratama Kudus sejak 10 Juni 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Nomor Pengukuhan : PEM-0868/WPJ.10/KP.0803/2013 sehingga selayaknya terdakwa ASRI BUDI UTOMO

selaku direktur CV ASTI JAYA mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kudus;

- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 antara lain adalah melaporkan SPT PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;

- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CV ASTI JAYA telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian CV ASTI

Halaman 15 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



JAYA telah diberi kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV ASTI JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan SPT PPH Tahunan maupun SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

- Bahwa kegiatan usaha yang CV ASTI JAYA pada tahun 2017 yaitu:

- 1) Menyewakan Louder kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. SRA/SPK/016/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
- 2) Menyewakan tractor kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017.
- 3) Pengadaan ampas Awur (ampas tebu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. TAS/SPK/025/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. SRA/SPK/025/2017 tanggal 24 September 2017.
- 4) Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017.
- 5) Menyewakan truk untuk mengangkut tebu kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017,
- 6) Pekerjaan pengurangan (Borrow Material) jalan tol di Pemalang – Batang paket 4 dengan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk di Gedung WASKITA Jalan MT HARYONO Kav. No. 10, Cawang, Jakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. 34/SPK-SUB/WK/PBRT.4/2017 tanggal 04 Maret 2017.
- 7) Menyewakan Esavator kepada PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) di Subang akan tetapi Sewa tersebut tanpa ada perjanjian dan SPK karena insidentil dan dibayar tunai;

Halaman 16 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel)

dengan pabrik Gula PT LAJU PERDANA INDAH di Pati.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha CV ASTI JAYA tersebut, dokumen yang menyertai penjualan dan penyerahan jasa adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK), invoice, faktur pajak, Rekapitulasi Tagihan dan Bukti pembayaran (transfer/bukti pembayaran) dan Rekening yang digunakan untuk menampung hasil penjualan dan jasa CV ASTI JAYA pada tahun 2017:

- Rekening BNI Cabang Kudus nomor 0503154461;
- Bank Jateng Cabang Kudus nomor 1024005794 ;
- BRI Cabang Kudus nomor 003801001735304

- Bahwa atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV ASTI JAYA berupa penyewaan alat berat dan penjualan ampas tebu dan grajen sebagai bahan bakar ketel di pabrik gula kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH, CV ASTI JAYA menerbitkan Faktur keluaran menerbitkan faktur pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 dan memungut PPN sebesar 10% yaitu :

N O.	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	0100171745771 044	14- Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 .5-093.000	425.000
2	0300171745771 047	01- Jun- 17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 .5-093.000	96.599.853
3	0300171745771 048	10- Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 .5-093.000	56.460.238
4	0100171745771 030	07- Mar- 17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644 .2-051.000	3.552.500
5	0100171745771	07-	PABRIK	01.001.644	5.177.500

Halaman 17 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	031	Mar-17	GULA RAJAWALI II (PERSERO) PERKEBUN	.2-051.000	
6	0100171745771 010	'06-MAR-17	AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.947.500
7	0100171745771 011	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	4.999.800
8	0100171745771 012	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	7.191.600
9	0100171745771 013	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
10	0100171745771 014	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	6.384.000
11	0100171745771 015	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	2.128.000
12	0100171745771 016	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	4.883.000
13	0100171745771 017	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
14	0100171745771 018	'06-MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	6.384.000
15	0100171745771	'06-	PERKEBUN	01.061.137	4.014.600

Halaman 18 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	019	MAR-17	AN NUSANTAR A IX	.4-051.000	
16	0100171745771 020	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	633.000
17	0100171745771 021	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	558.000
18	0100171745771 022	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	1.111.800
19	0100171745771 023	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	781.800
20	0100171745771 024	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	4.582.800
21	0100171745771 025	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	972.600
22	0100171745771 026	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
23	0100171745771 027	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
24	0100171745771 028	'06- MAR-17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	1.567.500
25	0100171745771	'06-	PERKEBUN	01.061.137	2.698.000

Halaman 19 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	029	MAR-17	AN NUSANTAR A IX	.4-051.000	
26	0100171745771 032	'16- MAR- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	14.926.250
27	0100171745771 033	'16- MAR- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	49.244.564
28	0100171745771 034	'16- MAR- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	6.612.000
29	0100171745771 035	'18- MAR- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	28.933.350
30	0100171745771 036	'13- APR- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	35.965.959
31	0100171745771 040	'05- JUN- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	1.403.850
32	0100171745771 042	'09- JUN- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	4.404.960
33	0100171745771 045	'01- JUL- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	10.499.600
34	0100171745771 046	'01- JUL- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	37.326.750
35	0100171745771	'05-	PERKEBUN	01.061.137	3.078.000

Halaman 20 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	049	AUG-17	AN NUSANTAR A IX	.4-051.000	
36	0100171745771 050	'05- AUG- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	9.258.550
37	0100171745771 052	'27- OCT- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	16.373.140
38	0100171745771 055	'10- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	180.209.17 2
39	0100171745771 056	'10- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	9.483.870
40	0100171745771 057	'10- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	6.940.270
41	0100171745771 058	'10- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	36.024.000
42	0100171745771 060	'13- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	26.234.820
43	0100171745771 061	'13- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	22.077.056
44	'0110171745771 059	'16- NOV- 17	PERKEBUN AN NUSANTAR A IX	01.061.137 .4-051.000	5.082.700
45	0100171745771	06-	LAJUPERDA	01.571.859	3.743.973

Halaman 21 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	054	NOV-17	NA INDAH	.6-038.000	
JUMLAH					748.815.92 5

- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak keluaran, atas transaksi yang dilakukan CV ASTI JAYA juga menerima pajak masukan dari pihak lawan (pihak kedua yang melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

N o.	NOFA	TGFA	MSPJ K	NPWP_L WN	NAMA_L WN	P P N _L W N
1	0100011724 136455	01-MAR-17	201703	01446081 0511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7. 81 9. 18 2
2	0100171782 459266	12-APR-17	201704	01446081 0511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7. 85 1. 00 0
3	0100171741 937001	28-JUL-17	201707	02799057 1514000	GENDHI S MULTI MANIS	13. 6 36 .3 64
4	0100011747 641558	01-AUG-17	201708	74682297 2503000	SEKAR BUMI PARAMA	7. 27 2. 72 7
5	0100011747 641559	09-SEP-17	201709	74682297 2503000	SEKAR BUMI PARAMA	7. 27 2. 72

Halaman 22 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						7
6	0100011747 641562	01- NOV- 17	20171 1	74682297 2503000	SEKAR BUMI PARAMA	7. 27 2. 72 7
7	0100201772 889127	23- NOV- 17	20171 1	02799057 1514000	GENDHI S MULTI MANIS	7. 15 8. 03 6

- Bahwa setelah menerbitkan faktur pajak kewajiban CV ASTI JAYA selaku wajib pajak adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan jumlah faktur pajak yang dikeluarkan akan tetapi terdakwa selaku Direktur PT ASTI JAYA Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 yang sudah memungut pajak pada tahun 2017 tidak disetorkan ke Kas Negara oleh Terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku Direktur CV ASTI JAYA sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa menyetorkan Sebagian pajak yang dipungut pada tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

N o.	Masa	No. NTPP	MAP/KJ S	Nilai Bayar	Tangg al Bayar
1	Novem ber	9152A479QL1TO VG2	4112/111 00	25.250.81 3	20- Mar- 18
2	Oktober	F295A477SUL07B G2	4112/111 00	16.373.14 0	20- Mar- 18
3	Agustus	08C35476NVS1R 4G2	4112/111 00	12.336.55 0	20- Mar- 18
4	Juli	04975475IEF1VB G2	4112/111 00	47.826.35 0	20- Mar- 18
5	Juni	4452F4B3U4DNG 1G2	4112/111 00	1.403.850	20- Mar- 18

Halaman 23 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	April	32F484743SBB2B G2	4112/111 00	1.439.400	20- Mar- 18
7	Maret	5A9BC4736FN00 EG2	4112/111 00	94.120.00 0	20- Mar- 18
8	Juli	4D42E3UDAV8KU P7P	4112/119 00	56.460.23 8	15- Agu- 17
9	Juni	466EA63SQ8Q8A 66P	4112/119 00	96.599.85 3	17- Jul-17
Jumlah				351.810.1 94	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor pajak yang telah dipungutnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp338.722.968,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Enam Delapan rupiah) sebagaimana Hasil pemeriksaan Ahli Penghitung Kerugian Negaradari KPP madya Semarang sebagai berikut :

URAIAN		MENURUT		KERUGI AN NEGARA (Rp)
		SPT/WP (Rp)	AHLI (Rp)	
PPN/PP				
n. BM				
PPN Dalam				
Negeri				
1	Eksport	0	0	0
	Peny. PPN-nya	0	7.488.159.250	7.488.15
2	dipungut sendiri	0		9.250
	Peny. PPN-nya	0	0	0
3	digunggung	0	0	0
	Peny. PPN-nya	0	0	0
4	dipungut	0	0	0
	Pemungut	0	0	0
	Peny. PPN-nya	0	0	0
5	tidak dipungut	0	0	0
	Penyerahan	0	0	0
	Dibebaskan	0	0	0
6	PPN	0	0	0
7	Return	0	0	0

Halaman 24 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Penyerahan			
Jumlah Penyerahan		0	7.488.159.250
			7.488.15
			9.250
			748.815.
1	Pajak Keluaran PK dipungut	0	748.815.925
			925
2	Pemungut PPN PPN atas	0	0
			0
3	Return Penyerahan Pajak Keluaran Harus	0	0
			0
Dipungut		0	748.815.925
			925
Pajak Masukan			
1	Import	0	0
			0
Pajak Masukan			
2	Dalam Negeri	0	58.282.763
			63
3	PM MTS Import	0	0
			0
3	PM MTS Dalam	0	0
			0
4	Negeri	0	0
			0
5	Return	0	0
			0
Pembelian			
Kompensasi PPN			
Masa			
Sebelumnya			
6		0	0
			0
			351.810.194
			351.810.
7	Setoran	0	194
			0
8	Lain-lain	0	0
			0
Jumlah Kredit Pajak		0	410.092.957
			410.092.
PPN ymh. (Lebih)			957
			338.722.
Dibayar		0	338.722.968
			968

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SANTOSO DWI PRASETYO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi merupakan Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan, Kanwil DJP Jawa Tengah I antara lain menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
 - Bahwa saksi yang membuat Laporan Kejadian nomor: Lap-1/LK/WPJ.10/2023 tanggal 31 Januari 2023;
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan yang diduga dilakukan oleh Saudara ASRI BUDI UTOMO melalui CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 - Bahwa Laporan Kejadian tersebut dibuat atas dasar Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP-13/WPJ.10/2022 tanggal 30 Desember 2022 terhadap CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 tahun pajak 2017. Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Bukti Permulaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
 - Bahwa dalam kesimpulan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut pemeriksa bukti permulaan menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan berupa dokumen transaksi, faktur pajak, SPT dan keterangan para pihak terkait yang menunjukkan bahwa Saudara ASRI BUDI UTOMO diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d atau i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk tahun pajak 2019 sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 397.005.731,- (Tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
 - Bahwa CV ASTI JAYA melakukan penyerahan jasa, menerima pembayaran atas penyerahan jasa dan memungut PPN atas jasa yang diserahkan. Sdr. ASRI BUDI UTOMO sebagai direktur CV ASTI JAYA tidak menyetorkan PPN untuk masa Januari 2017 s.d. Desember 2017

Halaman 26 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah dipungut;
- Bahwa Potensi Kerugian pada pendapatan Negara dari dugaan tindak pidana CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 tahun 2017 adalah sebesar Rp. 397.005.731,- (Tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa terhadap Wajib pajak telah disampaikan hak-nya untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun Wajib Pajak tidak menggunakan haknya tersebut dengan alasan tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BUSTOMI MUSTOFA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Aparatur Sipil Negara di Direktorat Jenderal Pajak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Account Representative di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus sejak September 2018 s.d. Desember 2022;
- Bahwa saksi yang melakukan pengawasan CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 untuk tahun pajak 2017;
- Bahwa CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus sejak 17 Mei 2013;
- Bahwa berdasarkan masterfile Wajib Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jendral Pajak (SIDJP) dan profil Wajib Pajak pada Approweb, CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 telah dikukuhkan sebagai PKP Terhitung sejak 17 Mei 2013 sesuai dengan PEM-00793/WPJ.10 / KP.0803/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 berkedudukan Ds. Wergu Wetan No 277-A RT. 005 RW. 004, Kota Kab. Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak kegiatan usaha dari CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 adalah Kegiatan Usaha JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL dengan KLU : 77306;
- Bahwa Berdasarkan data SPT Masa PPN masa Januari 2017 sampai dengan masa Desember 2017 yang telah disampaikan Wajib Pajak ke KPP Pratama

Halaman 27 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudus melalui e-filing, nama yang tertera pada kolom tanda tangan SPT Masa PPN CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 untuk masa Pajak Januari tahun 2017 sampai dengan masa Maret 2017 adalah saudara ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur;

- Bahwa berdasarkan data SPT Masa PPN dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak. isi dari SPT Masa PPN CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 adalah sbb :

Masa	BPS	P K	P M	KB/ (LB)	Tgl.S etor	Tgl. Lapor
Jan	S- 01009016/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	17/02/ 2017
Feb	S- 01017680/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/03/ 2017
Mar	S- 01023174/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	28/04/ 2017
Apr	S- 01028085/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	26/05/ 2017
Mei	S- 01029397/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	07/06/ 2017
Jun	S- 05014426/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/07/ 2017
Jul	S- 05021787/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	18/08/ 2017
Agu	S- 05025046/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/09/ 2017
Sep	S- 05033699/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/10/ 2017
Okt	S- 05037484/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	20/11/ 2017
Nov	S- 05044401/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	29/12/ 2017
Des	S- 05002973/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2018	0	0	0	-	16/01/ 2018

sesuai dengan Penyampaian SPT Masa PPN tahun 2017 a.n CV ASTI JAYA berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan kepada saksi;

Halaman 28 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 pernah menerbitkan faktur pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No	Nama Lawan	Faktur Terbit	Tgl. Faktur	Nilai PPN
1	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01001717457710 44	14-JUL-17	425.000
2	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 47	01-JUN-17	96.599.853
3	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 48	10-JUL-17	56.460.238
4	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 30	07-MAR-17	3.552.500
5	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 31	07-MAR-17	5.177.500
6	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 10	06-MAR-17	0
7	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 11	06-MAR-17	5.947.500
8	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 12	06-MAR-17	4.999.800
9	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 13	06-MAR-17	7.191.600
10	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 14	06-MAR-17	5.985.000
11	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 15	06-MAR-17	6.384.000
12	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 16	06-MAR-17	2.128.000
13	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 17	06-MAR-17	4.883.000
14	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 18	06-MAR-17	5.985.000
15	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	6.384.000
16	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	4.014.600
17	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	633.000
18	ERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	558.000
19	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	1.111.800
20	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	781.800
21	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	4.582.800
22	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	972.600
23	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	5.985.000
24	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	5.985.000
25	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	1.567.500
26	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-17	2.698.000
27	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-16	14.926.250
28	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-16	49.244.564
29	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-16	6.612.000
30	PERKEBUNAN	01001717457710	18-MAR-18	28.933.350
31	PERKEBUNAN	01001717457710	13-APR-13	35.965.959
32	PERKEBUNAN	01001717457710	05-JUN-05	1.403.850
33	PERKEBUNAN	01001717457710	09-JUN-09	4.404.960
34	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-01	10.499.600
35	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-01	37.326.750
36	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-05	3.078.000
	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-05	9.258.550

Halaman 29 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	PERKEBUNAN	01001717457710	27-OCT-	16.373.140
38	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	180.209.172
39	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	9.483.870
40	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	6.940.270
41	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	36.024.000
42	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	26.234.820
43	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	22.077.056
44	PERKEBUNAN	01101717457710	16-NOV-	5.082.700
45	LAJUPERDANA INDAH	01001717457710	06-NOV-	3.743.973
	JUMLAH			748.815.925

sesuai daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 berdasarkan data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal yang ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan Data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 pernah menerima faktur pajak masukan untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No.	NOFA	TGFA	MSPJ K	NPWP_LWN	NAMA_LW N	PPN_L WN
1	0100011724136455	01-MAR-17	2017 03	014460810 511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.8 19.182
2	0100171782459266	12-APR-17	2017 04	014460810 511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.8 51.000
3	0100171741937001	28-JUL-17	2017 07	027990571 514000	GENDHIS MULTI MANIS	13.6 36.364
4	0100011747641558	01-AUG-17	2017 08	746822972 503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.2 72.727
5	0100011747641559	09-SEP-17	2017 09	746822972 503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.2 72.727
6	0100011747641562	01-NOV-17	2017 11	746822972 503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.2 72.727
7	0100201772889127	23-NOV-17	2017 11	027990571 514000	GENDHIS MULTI MANIS	7.1 58.036

sesuai daftar Faktur Pajak yang diterima oleh CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 berdasarkan data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, ikhtisar pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk tahun pajak 2017 adalah sbb:

No.	Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	November	2017	9152A479QL1T OVG2	4112/11 100	25.25 0.813	20-Mar-18

Halaman 30 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Oktober	2017	<u>F295A477SULO</u> <u>7BG2</u>	4112/11 100	16.37 3.140	20-Mar-18
3	Agustus	2017	<u>08C35476NVS</u> <u>1R4G2</u>	4112/11 100	12.33 6.550	20-Mar-18
4	Juli	2017	<u>04975475IEF1</u> <u>VBG2</u>	4112/11 100	47.82 6.350	20-Mar-18
5	Juni	2017	<u>4452F4B3U4D</u> <u>NG1G2</u>	4112/11 100	1.40 3.850	20-Mar-18
6	April	2017	<u>32F484743SBB</u> <u>2BG2</u>	4112/11 100	1.43 9.400	20-Mar-18
7	Maret	2017	<u>5A9BC4736FN</u> <u>00EG2</u>	4112/11 100	94.12 0.000	20-Mar-18
8	Juli	2017	<u>4D42E3UDAV8</u> <u>KUP7P</u>	4112/11 900	56.46 0.238	15-Agu-17
9	Juni	2017	<u>466EA63S08Q</u> <u>8A66P</u>	4112/11 900	96.59 9.853	17-Jul-17
	Jumlah				351.81 0.194	

sesuai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan kepada saksi;

- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan Surat Himbauan SP2DK-2032/WPJ.10 / KP.08/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditunjukkan kepada saksi bahwa Surat tersebut merupakan surat himbauan terhadap CV. ASTI JAYA terkait kewajiban perpajakan yaitu PPN atas FAKTUR PAJAK yang telah diterbitkan oleh CV ASTI JAYA tahun 2017 kepada PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT LAJUPERDANA INDAH;
- Bahwa atas surat himbauan terhadap CV ASTI JAYA tahun 2017 sesuai dengan Surat Himbauan SP2DK-2032/WPJ.10 / KP.08/2019 tanggal 07 Januari 2019 wajib pajak tidak memenuhi permintaan untuk memberikan penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan berdasarkan BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN pada tanggal 6 April 2020 yang ditunjukkan kepada saksi bahwa BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN tersebut merupakan berita acara tidak dipenuhinya permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan karena pada tanggal tanggal 6 April 2020 CV ASTI JAYA tidak dapat memenuhi permintaan untuk memberikan penjelasan terkait data berupa FAKTUR PAJAK tahun 2017 yang telah diterbitkan kepada PERKEBUNAN NUSANTARA IX, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT LAJUPERDANA INDAH;
- Bahwa kemudian tindak lanjut yang dilakukan oleh KPP PRATAMA KUDUS

Halaman 31 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



mengusulkan untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap CV ASTI JAYA untuk tahun pajak 2017 ke KANWIL DJP JAWA TENGAH I;

- Bahwa kepada saksi ditunjukkan dokumen USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN INDIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. setelah melihat saksi menjelaskan bahwa Dokumen USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN INDIKASI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh KPP PRATAMA KUDUS yang mengusulkan agar dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap CV ASTI JAYA untuk tahun pajak 2017;
- Bahwa Indikasi tindak pidana yang diusulkan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan/atau pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP dengan modus operandinya Wajib Pajak (CV ASTI JAYA) telah menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN-nya namun tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN Masa April s.d Desember 2017;
- Bahwa Jumlah Perkiraan Kerugian Negara untuk tahun 2017 adalah sebesar PPN yang telah dipungut dan tidak disetorkan sebesar Rp. 397.005.731,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi AGUNG SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Kudus dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kudus;
- Bahwa bahwa CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 telah terdaftar pada tata usaha di KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS sampai dengan saat ini berdasarkan SURAT KETERANGAN TERDAFTAR Nomor : PEM-007937ER/WPJ.10 / KP.0803/2013 tanggal 17 Mei 2013 yang ditunjukkan kepada saksi;
- Berdasarkan Akta Pendirian CV ASTI JAYA no. 01 tanggal 16 Mei 2013 Notaris MUNZAROH, SH.M.Kn no. 01 tanggal 16 Mei 2013 Notaris MUNZAROH, SH.M.Kn yang ditunjukkan kepada saksi bahwa susunan Pengurus dan pemegang Saham CV ASTI JAYA, yaitu:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	ASRI BUDI UTOMO	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Direktur
2	DWI PRASETIA FENDI	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Pesero Komanditer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK Nomor : PEM-0868/WPJ.10.KP.0803/2013, tanggal 10 Juni 2013 yang ditunjukkan kepada saksi bahwa CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 telah dikukuhkan sebagai PENGUSAHA KENA PAJAK pada KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KUDUS sejak tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa Berdasarkan data di SIDJP, CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 melakukan kegiatan usaha JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL dengan KLU : 77306;
- Bahwa Berdasarkan data Kewajiban Pajak pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak serta profil Wajib Pajak CV ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 mempunyai kewajiban perpajakan pasal 21, pasal 25/29, pasal 4 ayat (2) dan kewajiban PPN sejak 20 September 2013;
- Bahwa Berdasarkan data Masterfile Wajib Pajak dan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 berkedudukan di Ds. Wergu Wetan No 277-A RT. 005 RW. 004, Kota Kab. Kudus Jawa Tengah;
- Bahwa Berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, SPT Masa PPN 2017 atas nama Wajib Pajak CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 hanya menyampaikan untuk Masa Januari tahun 2017 sampai dengan Masa Desember 2017 dan telah disampaikan ke KPP Pratama Kudus dengan uraian sebagai berikut:

Masa	BPS	PK	PM	KB/ (LB)	Tgl.S etor	Tgl. Lapor
Jan	S- 01009016/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	17/02/2017
Feb	S- 01017680/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/03/2017
Mar	S- 01023174/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	28/04/2017
Apr	S- 01028085/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	26/05/2017
Mei	S- 01029397/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	07/06/2017
Jun	S- 05014426/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/07/2017
Jul	S-	0	0	0	-	18/08/2017

Halaman 33 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	05021787/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017					17
Agu	S- 05025046/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/09/20 17
Sep	S- 05033699/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/10/20 17
Okt	S- 05037484/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	20/11/20 17
Nov	S- 05044401/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2017	0	0	0	-	29/12/20 17
Des	S- 05002973/PPN1111/WPJ.1 0 / KP.0803/2018	0	0	0	-	16/01/20 18

- Bahwa berdasarkan Data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 pernah menerbitkan faktur pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No	Nama Lawan	Faktur Terbit	Tgl. Faktur	Nilai PPN
1	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01001717457710 44	14-JUL- 17	425.000
2	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 47	01-JUN- 17	96.599.853
3	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 48	10-JUL- 17	56.460.238
4	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 30	07-MAR- 17	3.552.500
5	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 31	07-MAR- 17	5.177.500
6	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 10	06-MAR- 17	5.947.500
7	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 11	06-MAR- 17	4.999.800
8	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 12	06-MAR- 17	7.191.600
9	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 13	06-MAR- 17	5.985.000
10	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 14	06-MAR- 17	6.384.000
11	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 15	06-MAR- 17	2.128.000
12	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 16	06-MAR- 17	4.883.000
13	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 17	06-MAR- 17	5.985.000
14	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 18	06-MAR- 17	6.384.000
15	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	4.014.600

Halaman 34 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	633.000
17	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	558.000
18	ERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	1.111.800
19	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	781.800
20	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	4.582.800
21	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	972.600
22	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	5.985.000
23	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	5.985.000
24	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	1.567.500
25	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	2.698.000
26	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	14.926.250
27	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	49.244.564
28	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	6.612.000
29	PERKEBUNAN	01001717457710	18-MAR-	28.933.350
30	PERKEBUNAN	01001717457710	13-APR-	35.965.959
31	PERKEBUNAN	01001717457710	05-JUN-	1.403.850
32	PERKEBUNAN	01001717457710	09-JUN-	4.404.960
33	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-	10.499.600
34	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-	37.326.750
35	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-	3.078.000
36	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-	9.258.550
37	PERKEBUNAN	01001717457710	27-OCT-	16.373.140
38	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	180.209.172
39	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	9.483.870
40	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	6.940.270
41	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	36.024.000
42	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	26.234.820
43	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	22.077.056
44	PERKEBUNAN	01101717457710	16-NOV-	5.082.700
45	LAJUPERDANA	01001717457710	06-NOV-	3.743.973
	JUMLAH			748.815.925

- Bahwa berdasarkan Data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 pernah menerima faktur pajak masukan untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No.	NOFA	TGFA	MSPJK	NPWP LWN	NAMA LWN	PPN LWN
1	01000117241364 55	01-MAR-17	201703	0144608105110 00	KARYA ZIRANG UTAMA	7.819.182
2	01001717824592 66	12-APR-17	201704	0144608105110 00	KARYA ZIRANG UTAMA	7.851.000
3	01001717419370 01	28-JUL-17	201707	0279905715140 00	GENDHIS MULTI MANIS	13.636.364
4	01000117476415 58	01-AUG-17	201708	7468229725030 00	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
5	01000117476415 59	09-SEP-17	201709	7468229725030 00	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
6	01000117476415 62	01-NOV-17	201711	7468229725030 00	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
7	01002017728891 27	23-NOV-17	201711	0279905715140 00	GENDHIS MULTI MANIS	7.158.36

- sesuai daftar Faktur Pajak yang diterima oleh CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9- 506.000 berdasarkan data PKPM dalam Sistem Apportal Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, ikhtisar

Halaman 35 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk tahun pajak 2017 adalah sbb:

No.	Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	November	2017	9152A479QL1T OVG2	4112/11 100	25.25 0.813	20-Mar-18
2	Oktober	2017	F295A477SULO 7BG2	4112/11 100	16.37 3.140	20-Mar-18
3	Agustus	2017	08C35476NVS1 R4G2	4112/11 100	12.33 6.550	20-Mar-18
4	Juli	2017	04975475IEF1V BG2	4112/11 100	47.82 6.350	20-Mar-18
5	Juni	2017	4452F4B3U4DN G1G2	4112/11 100	1.40 3.850	20-Mar-18
6	April	2017	32F484743SBB 2BG2	4112/11 100	1.43 9.400	20-Mar-18
7	Maret	2017	5A9BC4736FN0 0EG2	4112/11 100	94.12 0.000	20-Mar-18
8	Juli	2017	4D42E3UDAV8K UP7P	4112/11 900	56.46 0.238	15-Agu-17
9	Juni	2017	466EA635O8Q8 A66P	4112/11 900	96.59 9.853	17-Jul-17
	Jumlah				351.81 0.194	

sesuai Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjukkan kepada saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. DWI PRASETIA FENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Pesero Comanditer CV ASTI JAYA dan saksi merupakan mantan istri terdakwa;
- Berdasarkan Akta Pendirian CV ASTI JAYA 01 tanggal 16 Mei 2013 Notaris MUNZAROH, SH. M.Kn yang ditunjukkan kepada saksi bahwa susunan Pengurus CV ASTI JAYA, yaitu:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	ASRI BUDI UTOMO	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Direktur
2	DWI PRASETIA FENDI	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Pesero Komanditer

- Bahwa tugas dan wewenang saksi di CV ASTI JAYA antara lain adalah:
 - Tanda tangan pembukaan Giro/Cheq;
 - Bayar gaji karyawan;
 - Mengecek uang masuk di Rekening CV ASTI JAYA atas perintah Pak ASRI BUDI UTOMO
- Bahwa kegiatan usaha dari CV ASTI JAYA dalam tahun 2017, yaitu:
 - Menyewakan traktor;
 - Menyewakan Louder;
 - Pengadaan Ampas Awul;
 - Menyewakan Esavator



- Bahwa tempat Usaha CV ASTI JAYA, yaitu:
 - Lokasi usaha sebelumnya CV ASTI JAYA ada di Jalan Patimura No. 06, RT. 005/RW.004, Werguwetan, Kudus
 - Kemudian Sekitar awal tahun 2014 pindah ke Werguwetan RT 005/RW 004, no. 277 A, Werguwetan, Kudus
- Bahwa Penyerahan Jasa CV ASTI JAYA untuk tahun 2017
 - Sewa Alat-alat dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX
 - Pengadaan Ampas Awur (ampas tebu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX
 - Pekerjaan jalan TOL dengan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan Pembeli (Costumer) kepada CV ASTI JAYA pada tahun 2017:
 - Rekening BNI Cabang Kudus
 - BRI Cabang Kudus

5. Saksi BIWIN AGUS ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu kakak kandung terdakwa ASRI BUDI UTOMO ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai bagian administrasi di CV ASTI JAYA tahun 2016 sampai dengan pertengahan tahun 2018;
- Berdasarkan Akta Pendirian CV ASTI JAYA 01 tanggal 16 Mei 2013 Notaris MUNZAROH, SH. M.Kn yang ditunjukkan kepada saksi bahwa susunan Pengurus CV ASTI JAYA, yaitu:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	ASRI BUDI UTOMO	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Direktur
2	DWI PRASETIA FENDI	Wergu Wetan RT 005 RW 004, Kudus	Pesero Komanditer

- Bahwa tugas dan wewenang saya di CV ASTI JAYA antara lain:
 - menangani pembuatan Faktur Pajak CV ASTI JAYA;
 - Melakukan penagihan atas perkejaan CV ASTI JAYA
- Bahwa kegiatan usaha dari CV ASTI JAYA dalam tahun 2017, yaitu:
 - Menyewakan traktor;
 - Menyewakan Louder;
 - Menjual ampas untuk bahan bakar;
 - Menyewakan Esavator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Usaha CV ASTI JAYA, yaitu:
 - Lokasi usaha sebelumnya CV ASTI JAYA ada di Jalan Jalan Patimura No. 06, RT. 005/RW.004, Werguwetan, Kudus
 - Kemudian Sekitar awal tahun 2014 pindah ke Werguwetan RT 005/RW 004, no. 277 A, Werguwetan, Kudus
- Bahwa ASRI BUDI UTOMO yang menangani Penjualan/penyerahan jasa sewa CV ASTI JAYA untuk mendapatkan kontrak pekerjaan dengan pihak pembeli dalam tahun 2017;
- Bahwa ASRI BUDI UTOMO yang menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) atas Penyerahan jasa CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero)
- Bahwa penyerahan jasa CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero) telah dipungut PPN-nya sebesar 10%;
- Kepada Saksi ditunjukkan daftar FAKTUR PAJAK KELUARAN yang telah diterbitkan oleh CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH pada tahun 2017 berdasarkan SIDJP

No	Nama Lawan	Faktur Terbit	Tgl. Faktur	Nilai PPN
1	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01001717457710 44	14-JUL-17	425.000
2	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 47	01-JUN-17	96.599.853
3	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	03001717457710 48	10-JUL-17	56.460.238
4	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 30	07-MAR-17	3.552.500
5	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01001717457710 31	07-MAR-17	5.177.500
6	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 10	06-MAR-17	5.947.500
7	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 11	06-MAR-17	4.999.800
8	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 12	06-MAR-17	7.191.600
9	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 13	06-MAR-17	5.985.000
10	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 14	06-MAR-17	6.384.000
11	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 15	06-MAR-17	2.128.000
12	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 16	06-MAR-17	4.883.000
13	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 17	06-MAR-17	5.985.000
14	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 18	06-MAR-17	6.384.000
15	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 19	06-MAR-17	4.014.600
16	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 20	06-MAR-17	633.000
17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 21	06-MAR-17	558.000
18	ERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 22	06-MAR-17	1.111.800
19	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 23	06-MAR-17	781.800
20	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01001717457710 24	06-MAR-17	4.582.800

Halaman 38 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



21	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	972.600
22	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	5.985.000
23	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	5.985.000
24	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	1.567.500
25	PERKEBUNAN	01001717457710	06-MAR-	2.698.000
26	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	14.926.250
27	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	49.244.564
28	PERKEBUNAN	01001717457710	16-MAR-	6.612.000
29	PERKEBUNAN	01001717457710	18-MAR-	28.933.350
30	PERKEBUNAN	01001717457710	13-APR-	35.965.959
31	PERKEBUNAN	01001717457710	05-JUN-	1.403.850
32	PERKEBUNAN	01001717457710	09-JUN-	4.404.960
33	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-	10.499.600
34	PERKEBUNAN	01001717457710	01-JUL-	37.326.750
35	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-	3.078.000
36	PERKEBUNAN	01001717457710	05-AUG-	9.258.550
37	PERKEBUNAN	01001717457710	27-OCT-	16.373.140
38	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	180.209.172
39	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	9.483.870
40	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	6.940.270
41	PERKEBUNAN	01001717457710	10-NOV-	36.024.000
42	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	26.234.820
43	PERKEBUNAN	01001717457710	13-NOV-	22.077.056
44	PERKEBUNAN	01101717457710	16-NOV-	5.082.700
45	LAJUPERDANA	01001717457710	06-NOV-	3.743.973
	JUMLAH			748.815.925

- Bahwa, setelah melihat saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Faktur Pajak yang telah oleh diterbitkan oleh CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJU PERDANA INDAH pada tahun 2017;
- Saksi yang membuat Faktur Pajak tersebut sebagai syarat untuk melakukan penagihan kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH pada tahun 2017;

- Bahwa ASRI BUDI UTOMO yang menandatangani Faktur Pajak atas Penjualan/penyerahan jasa CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJU PERDANA INDAH pada tahun 2017;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi ITTA TRIASTUTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO ;
- Bahwa saksi bukan Konsultan dari CV ASTI JAYA, namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta bantuan oleh Bapak ASRI BUDI UTOMO menyusun SPT

Tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN CV ASTI JAYA tahun 2017;

- Bahwa pada saat menyusun SPT Tahunan PPh Badan CV ASTI JAYA tahun Pajak 2017 sebenarnya masih ada pajak yang harus dibayar oleh CV ASTI JAYA, namun ASRI BUDI UTOMO meminta kepada saksi untuk membuat perhitungan NIHIL agar tidak ada pembayaran, karena CV ASTI JAYA tidak memiliki uang untuk membayar kekurangan pajak tersebut;
- Bahwa, kepada Saksi ditunjukkan SPT Masa PPN atas nama CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk masa pajak Januari tahun 2017 sampai dengan Desember 2017:

Masa	BPS	P K	P M	KB/ (LB)	Tgl Se tor	Tgl. Lapo
Jan	S-01009016/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	17/02/2017
Feb	S-01017680/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/03/2017
Mar	S-01023174/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	28/04/2017
Apr	S-01028085/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	26/05/2017
Mei	S-01029397/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	07/06/2017
Jun	S-05014426/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/07/2017
Jul	S-05021787/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	18/08/2017
Agu	S-05025046/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/09/2017
Sep	S-05033699/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/10/2017
Okt	S-05037484/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	20/11/2017
Nov	S-05044401/PPN1111/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	29/12/2017
Des	S-05002973/PPN1111/WPJ.10 /	0	0	0	-	16/01/2018

Halaman 40 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KP.0803/2018					
--	--------------	--	--	--	--	--

- Bahwa, Setelah melihat saksi menjelaskan sebagai berikut:

- Yang mengisi SPT Masa CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 adalah saksi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Karywan CV ASTI JAYA yaitu Saudara BIWIN;
- Yang menandatangani SPT masa PPN CV ASTI JAYA masa Januari s.d Desember 2017 adalah ASRI BUDI UTOMO selaku Direktur CV ASTI JAYA;
- Dalam menyusun SPT Masa PPN Masa Januari s.d Desember tahun 2017 ASRI BUDI UTOMO meminta saksi untuk membuat SPT masa PPN dengan status NIHIL karena CV ASTI JAYA tidak memiliki uang.

- Bahwa CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 tidak melaporkan Faktur pajak –faktur pajak yang telah diterbitkan tahun 2017 karena CV ASTI JAYA tidak memiliki uang untuk melakukan pembayaran atas faktur pajak tersebut;

- Bahwa saksi tidak diberikan data-data oleh Saudara ASRI BUDI UTOMO untuk membuat SPT Masa PPN CV ASTI JAYA untuk masa Januari s.d Desember 2017. Saya hanya diminta oleh Pak ASRI BUDI UTOMO untuk membuat SPT Masa PPN selama masa Januari s.d Desember 2017 adalah NIHIL tanpa transaksi;

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau disetor dalam SPT Masa PPN CV ASTI JAYA untuk masa Januari s.d Desember 2017, karena saya hanya diminta oleh Pak ASRI BUDI UTOMO untuk membuat pelaporannya NIHIL tanpa transaksi;

- Bahwa saksi tidak tahu faktur yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA selama masa Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 dan saksi juga tidak diberikan data-data oleh ASRI BUDI UTOMO untuk membuat SPT masa PPN CV ASTI JAYA untuk masa Januari s.d Desember 2017. Pelaporan SPT masa PPN CV ASTI JAYA untuk masa Januari s.d Desember 2017 dibuat NIHIL atas permintaan Saudara ASRI BUDI UTOMO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi M. SULAEMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerjasama dengan CV Asti Jaya, yaitu menjadi subkontraktor dalam hal pengangkutan tebu ke PG Pangka dan PG Sragi, dimana saksi yang melakukan pekerjaan tersebut menggunakan bendera CV Asti Jaya ;

- Bahwa ASRI BUDI UTOMO yang menangani Penjualan/penyerahan jasa sewa CV ASTI JAYA untuk mendapatkan kontrak pekerjaan

Halaman 41 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



- dengan pihak pembeli dalam tahun 2017;
- bahwa saksi pernah menerima hasil pembayaran atas tagihan CV ASTI JAYA dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX/PG SRAGI, Pekalongan dan Pabrik Gula Pangka, Tegal selama tahun 2017 Dengan Surat Kuasa dari ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA. Hal ini karena pekerjaan memang saksi yang mengerjakan, dan dengan modal saksi sendiri. Setelah uang diterima, uang PPN sebesar 10% diserahkan ke ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa hasil pembayaran tagihan CV ASTI JAYA dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX/PG SRAGI, Pekalongan dan Pabrik Gula Pangka, Tegal selama tahun 2017 melalui transfer menggunakan Rekening Bank BNI Cabang Pekalongan atas nama saksi yaitu M. Solaiman dan ada yang diterima secara tunai;
- Bahwa bukti transfer yang merupakan pembayaran dari BNI KCP Comal nomor rekening 2223337153 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX/PG SRAGI, PEKALONGAN ke rekening BNI nomor 1972090956 atas nama M SOLAIMAN yaitu:

No.	Transfer		
	Rekening PG SRAGI	Rek Penerima	Jumlah
1	2223337153	1972090956 a.n M SOLAIMAN	254,473,404
2	2223337153	1972090956 a.n M SOLAIMAN	233,966,540
3	2223337153	1972090956 a.n M SOLAIMAN	43,401,355
4	2223337153	1972090956 a.n M SOLAIMAN	80,514,000
5	2223337153	1972090956 a.n M SOLAIMAN	388,432,363
			1,000,787,662

- Bahwa, BUKTI KAS KELUAR dan KWITANSI PEMBAYARAN dari Pabrik Gula Pangka, Tegal selama tahun 2017 yaitu:

Tanggal Pembayaran	Kuitansi /Bukti Kas Keluar
23 Agustus 2017	508.924.268
23 Agustus 2017	504.457.278
23 Agustus 2017	1.187.918
23 Agustus 2017	467.084.778
23 Agustus 2017	23.301.025
30 Agustus 2017	434.728.195
30 Agustus 2017	42.617.438
Jumlah Pembayaran	1.982.300.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi HERRY RISWANDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa saksi merupakan staff CSR di PG Rajawali II Cirebon;
- bahwa PT PABRIK GULA RAJAWALI II pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA berupa pekerjaan pembuatan drainase kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kontraknya dimulai sejak tanggal 11 November 2016 dan 27 Desember 2016;

- Bahwa penyelesaian pekerjaan/penyerahan hasil pekerjaan dilakukan pada 31 Januari 2017 sedangkan tagihan atas penyerahan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada 7 Maret 2017;
- Bahwa transaksi yang terjadi antara PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 tersebut tercatat dalam bentuk surat perjanjian kerja (SPK), yaitu SPK nomor 41480-HJ/PERSE/16.180/SPK, tanggal 27 Desember 2016 dan SPK nomor 41480-HJ/PESWA/16.169/SPK, tanggal 11 November 2016;
- Bahwa pembayaran dilakukan melalui transfer ke Bank BNI Cabang Kudus atas nama CV Asti Jaya nomor rekening 0503154461 dari rekening PT PG Rajawali II nomor rekening Bank BNI Cabang Cirebon nomor rekening 25222448;
- Kepada Saksi ditunjukkan daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) dalam tahun 2017 adalah sbb:

- NO	FAKTUR PAJAK		-	D P P	-	P P N
	Nomor	Tanggal				
1	1001717457 71030	7-Mar- 17	35,525, 000		3,552,5 00	
2	1001717457 71031	7-Mar- 17	51,775, 000		5,177,5 00	
	JUMLAH		87,300, 000		8,730,0 00	

Setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:

- Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 tahun 2017 saat melakukan penagihan;
- Penandatanganan faktur pajak tersebut adalah ASRI BUDI UTOMO;
- PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) telah menerima Faktur Pajak tersebut dan telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) masa Maret tahun 2017;
- Bahwa nilai pembayaran PT Rajawali sebesar Rp. 94.284.000, sedangkan nilai tagihan CV ASTI JAYA terhadap PT PABRIK GULA RAJAWALI II yaitu sebesar Rp 96.030.000. Selisih Rp. 1.746.000 merupakan PPH 23 yang dipotong oleh PT PG Rajawali II kepada CV Asti Jaya.

Halaman 43 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi AGUNG ERRY WARDHANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa saksi merupakan Bagian Perencanaan dan staf Sub Sustainability di Sub Bagian Logistik dan Penjualan di PTPN IX, Surakarta;
- Bahwa pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017, yaitu berupa transaksi sewa traktor dan sewa alat berat loader (All in);
- Bahwa transaksi yang terjadi antara Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar dengan CV. ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 tersebut tercatat dalam bentuk surat perjanjian/kerjasama (SPK). Terdapat 5 (lima) SPK yaitu dengan nomor:
 - TAS/ TAS/SPK/078/VII/2016 tanggal 21Juli 2016 berupa sewa traktor 50 pk;
 - TAS/SPK/25/VII/2017 tanggal 04Juli 2017 berupa muat dan angkut ampas awul ;
 - TAS/SPK/023/VI/2017 tanggal 03Juni 2017 .berupa sewa alat berat loader;
 - TAS/SPK/020/IV/2016 tanggal 12 April 2016 berupa sewa loader;
 - TAS/SPK/078/VII/2016 tanggal 21Juli 2016 tarik lori gula SHS;
 - TAS/SPK/028/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 berupa sewa traktor 90 pk buat narik tebu;V/2016 tanggal 28 Mei 2016 berupa sewa traktor 90 pk buat narik tebu;
- Bahwa Pihak yang mewakili CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk menandatangani surat perjanjian atau kerjasama tersebut adalah ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa cara pembayaran atas transaksi antara PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 dalam tahun 2017 dilakukan secara tunai dan transfer;
- Bahwa pembayaran tunai diberikan kepada ASRI BUDI UTOMO sedangkan pembayaran secara transfer, ditransfer dari Rekening PG Tasikmadu di BNI, ke rekening BNI a.n. CV ASTI JAYA, dan ke rekening BNI a.n. ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan daftar 30 Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar dalam tahun 2017 adalah sbb:

Halaman 44 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	No Faktur	Tangg	Ma	DPP	PPN
1	010017174	06	20	59.475.	5.947.
2	010017174	06	20	49.998.	4.999.
3	010017174	06	20	71.916.	7.191.
4	010017174	06	20	59.850.	5.985.
5	010017174	06	20	63.840.	6.384.
6	010017174	06	20	21.280.	2.128.
7	010017174	06	20	48.830.	4.883.
8	010017174	06	20	59.850.	5.985.
9	010017174	06	20	63.840.	6.384.
10		06	20		
	010017174	Maret	17-	40.	4.014.
10	5771019	2017	03	146.000	600
		06	20		
11	010017174	Maret	17-	6.330.0	633.00
	5771020	2017	03	00	0
12		06	20		
	010017174	Maret	17-	5.580.0	558.00
12	5771021	2017	03	00	0
		06	20		
13	010017174	Maret	17-	11.	1.111.
	5771022	2017	03	118.000	800
14		06	20		
	010017174	Maret	17-	7.818.0	781.80
14	5771023	2017	03	00	0
		06	20		
15	010017174	Maret	17-	45.	4.582.
	5771024	2017	03	828.000	800
16		06	20		
	010017174	Maret	17-	9.726.0	972.60
16	5771025	2017	03	00	0
		06	20	5	
17	010017174	Maret	17-	985000	5.985.
	5771026	2017	03	0	000
18		06	20		
	010017174	Maret	17-	59.	5.985.
18	5771027	2017	03	850.000	000
		06	20		
19	010017174	Maret	17-	15.	1.567.
	5771028	2017	03	675.000	500
20		06	20		
	010017174	Maret	17-	26.	2.698.
20	5771029	2017	03	980.000	000

Halaman 45 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



21	010017174 5771034	16 Maret 2017	20 17- 03	66. 120.000	6.612. 000
22	010017174 5771037	27 April 2017	20 17- 04	7.518.0 00	751.80 0
23	010017174 5771038	27 April 2017	20 17- 04	6.876.0 00	687.60 0
24	010017174 5771045	01 Juli 2017	20 17- 10	104.9 96.000	10.4 99.600
25	010017174 5771046	01 Juli 2017	20 17- 10	373. 267.500	37.3 26.750
26	010017174 5771049	05 Agust us 2017	20 17- 10	30. 780.000	3.078. 000
27	010017174 5771050	05 Agust us 2017	20 17- 10	9 2.585.5 00	9.258. 550
28	010017174 5771056	10 Nope mber 2017	20 17- 12	94. 838.700	9.483. 870
29	010017174 5771057	10 Nope mber 2017	20 17- 12	69. 402.700	6.940. 270
30	010017174 5771058	10 Nope mber 2017	20 17- 12	360. 240.000	36.0 24.000
	Jumlah			1.994.4 04.400	199.44 0.440

Setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:

- Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 padatahun 2017;



- Pabrik Gula Tasikmadu menerima Faktur Pajak tersebut kemudian dibuatkan rekapitulasi, selanjutnya dilaporkan ke Pusat di Semarang untuk dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017;

- Bahwa jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Tasikmadu dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp 198.001.040,- khusus untuk PPN-nya. Sedangkan secara keseluruhan setelah dikurangi PPh 23 sebesar 2% adalah kurang lebih sebesar Rp 2.134.451.211,20. Rinciannya adalah DPP sebesar Rp 1.980.010.400,- PPN sebesar Rp 198.001.040, PPh Ps 23 sebesar Rp 43.560.228,8.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

- 10.** Saksi DWI ENGGAR NOVIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;
 - b. Bahwa saksi merupakan Asisten Manager Keuangan PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Sragi, Pekalongan;
 - c. Bahwa Pabrik Gula Sragi, Pekalongan pernah melakukan transaksi pekerjaan dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2016, yaitu berupa transaksi sewa traktor dan jasa antar jemput tenaga tebang tebu dan angkutan truk, tapi penerbitan faktur pajak dan pembayarannya di tahun 2017;
 - d. Bahwa SPK dan transaksi pekerjaan seluruhnya terjadi di tahun 2016, tetapi penerbitan faktur pajak terjadi di tahun 2017;
 - e. Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BNI nomor 1972090956 atas nama Bpk M. SOLAIMAN dan rekening BRI 003801001359302 atas nama CV ASTI JAYA;
 - f. Bahwa Jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Sragi, Pekalongan dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 sebesar Rp1.081.477.161 dengan rincian DPP Rp 1.001.367.741,- ditambah PPN Rp 100.136.773,- dikurangi PPh 23 sebesar 2% (Rp20.027.355,-);
 - g. Bahwa Kepada Saksi ditunjukkan daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Sragi, Pekalongan dalam tahun 2017 adalah sbb:

NO	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
	Nomor	Tangga		



		I		
		16-		
	010017174577103	MAR-	149,262,	
1	2	17	500	14,926,250
		16-		
	010017174577103	MAR-	492,445,	
2	3	17	646	49,244,564
		13-		
	010017174577103	APR-	359,659,	
3	6	17	595	35,965,959
			1.001.367.74	
	JUMLAH		1	100.136.773

Setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:

- Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017;
 - Pabrik Gula Sragi, Pekalongan menerima Faktur Pajak tersebut kemudian dibuatkan rekapitulasi, selanjutnya dilaporkan ke Pusat di Semarang untuk dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017
- Bahwa, Jumlah yang dibayarkan oleh Pabrik Gula Sragi, Pekalongan kepada CV ASTI JAYA atas transaksi tahun 2017 sebesar Rp1.081.477.161,- dengan rincian:

DPP	1,001,367,741
PPN	100,136,774
Jumlah	1,101,504,515
PPH Pasal 23	20,027,355
Jumlah Pembayaran	1,081,477,161

DPP Rp1.001.367.741,- ditambah PPN Rp100.136.774,- dikurangi PPh 23 sebesar 2% (Rp20.027.355,-). Pembayaran ditransfer dari BNI KCP Comal nomor rekening 2223337153 atas nama PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX/PG SRAGI PT ke rekening BNI nomor 1972090956 atas nama Bpk M SOLAIMAN dan rekening BRI 003801001359302 atas nama CV ASTI JAYA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi MUKTI TISNAWATI, SE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Asisten Kepala Adm., Keuangan dan Umum di Pabrik Gula Rendeng, Kudus;
- Pabrik Gula Rendeng, Kudus pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017, yaitu berupa transaksi sewa traktor, loader dan pengadaan BBA (bahan Bakar Alternatif) berupa saw dust;
- Bahwa Pihak yang mewakili CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk menandatangani surat perjanjian atau kerjasama tersebut adalah Direktur PT ASTI JAYA yaitu ASRI BUDI UTOMO selaku Direktur;
- Bahwa pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Rendeng, Kudus dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 sebesar Rp 875.424.946,- dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	DPP	PPN	Total
SAW DUST	Rp. 437.070.300	Rp. 43.707.030	Rp. 480.777.330
SEWA TRAKTOR	Rp. 358.770.560	Rp. 35.877.056	Rp. 394.647.616
Jumlah	Rp. 795.840.860	Rp. 79.584.086	Rp. 875.424.946

- Bahwa Pembayaran antara Pabrik Gula Rendeng, Kudus dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 dalam tahun 2017 dilakukan melalui transfer ke rekening CV ASTI JAYA di Bank BNI no rekening 0503154461 dan ada yang diambil Tunai secara bertahap oleh ASRI BUDI UTOMO

Bahwa, Kepada Sakasi ditunjukkan daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Rendeng, Kudus dalam tahun 2017 adalah sbb:

N	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	0100171745771035	MAR-18 17	289,33 3,500	28,933,350
2	0100171745771040	'05- JUN-17	14,03 8,500	1,403,850
3	0100171745771042	'09- JUN-17	44,04 9,600	4,404,960
4	0100171745771060	'13- NOV-17	262,34 8,200	26,234,820
5	0100171745771061	'13- NOV-17	220,77 0,560	22,077,056
	JUMLAH		830.540.36 0	83.054.036

Halaman 49 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Bahwa, setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:
 - Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017;
 - Pabrik Gula Rendeng, Kudus menerima Faktur Pajak tersebut kemudian dibuatkan rekapitulasi, selanjutnya dilaporkan ke Pusat di Semarang untuk dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017;
 - Nama yang tercantum dalam tanda tangan elektronik pada FAKTUR PAJAK tersebut adalah Pak ASRI BUDI UTOMO
- Bahwa Jumlah yang dibayarkan oleh Pabrik Gula Rendeng, Kudus kepada CV ASTI JAYA atas transaksi tahun 2017 sebesar Rp 875.424.946 termasuk PPN sebesar 10%;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. Saksi KHOLIB YULIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa saksi merupakan Manager Keuangan PG-Mojo;
- Pabrik Gula Mojo pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA yaitu berupa transaksi sewa traktor dan jasa angkut ampas awur dalam tahun 2017;
- Pihak yang mewakili CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk menandatangani surat perjanjian atau kerjasama tersebut adalah ASRI BUDI UTOMO;
- Bahwa Cara pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Mojo dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 dalam tahun 2017 dilakukan secara transfer dan setor tunai ke rekening BNI a.n. CV ASTI JAYA nomor 0503154461;
- Kepada Saksi ditunjukkan daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Mojo dalam tahun 2017 adalah sbb:

NO	No Faktur	Tan	M	DPP	PPN
1	01001717	27-	20	163.7	16.37
2	01101717	16-	20	50.82	5.082
Jumlah				214.5	
				58.40	21.45
				0	5.540



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:
 - Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017;
 - Nama yang tercantum untuk menandatangani secara elektronik pada FAKTUR PAJAK tersebut adalah ASRI BUDI UTOMO;
 - Pabrik Gula Mojo menerima Faktur Pajak tersebut dan Atas faktur pajak tersebut kemudian dibuatkan rekapitulasi, selanjutnya dilaporkan ke Pusat di Semarang untuk dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017.
- Bahwa, jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Mojo dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 berdasarkan data yang saya dapat adalah sebagai berikut:

NO	No Faktur	Tan	DPP	PPN	Jumla	PF
1	01001717	27	163.7	16.37	55.90	1.6
	45771052	—	31.40	3.140	9.700	6.1
2	01101717	16	50.82	5.082	180.1	3.1
	45771059	—	7.000	.700	04.54	4.1
	Jumlah		214.5	21.45	236.0	4.29
			58.40	5.540	14.24	1.16
			0		0	8

Sehingga jumlah yang dibayarkan kepada CV ASTI JAYA atas pekerjaan tahun 2017 adalah sebesar Rp. 231.723.072

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. Saksi AHMAD JUHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa ASRI BUDI UTOMO;
 - Bahwa saksi merupakan Manager Keuangan dan Umum PT SINERGI GULA NUSANTARA PG Pangka, Tegal;
 - Bahwa Pabrik Gula Pangka, Tegal pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017, yaitu berupa transaksi jasa angkutan tebu dengan truk dan antar jemput tenaga tebang tebu;
 - Bahwa transaksi yang terjadi antara Pabrik Gula Pangka, Tegaldengan CV. ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 tersebut tercatat dalam bentuk surat perjanjian/kerjasama (SPK) dengan nomor PAN/SPK/018/2017 tanggal 29 Juni 2017;
 - Cara pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Pangka, Tegal

Halaman 51 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 dalam tahun 2017 secara tunai bertahap. Ada rekapitulasi angkutan tebu dan truk yang dipersamakan dengan invoice, dan PG menerima Surat Kuasa dari ASRI BUDI UTOMO kepada M. SOLAIMAN untuk menerima pembayaran, sehingga pembayaran diberikan kepada M. SOLAIMAN secara tunai bertahap;

- Jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Pangka, Tegal dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 sebesar Rp1.982.300.900,- dengan rincian DPP Rp1.802.091.725,- ditambah PPN Rp180.209.172;
- Bahwa, kepada Saksi ditunjukkan daftar Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Pangka, Tegal dalam tahun 2017 adalah sbb:

NO	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
1		'10-		
		NO	1,802	180,
	01001717	V-	,091,72	209,1
	45771055	17	5	72

- Bahwa, setelah melihat saksi menjelaskan bahwa:
 - Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017;
 - Pabrik Gula Pangka, Tegal menerima Faktur Pajak tersebut kemudian dibuatkan rekapitulasi, selanjutnya dilaporkan ke Pusat di Semarang untuk dilaporkan sebagai kredit pajak dalam SPT Masa PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017
- Bahwa jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Pangka, Tegal dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 sebesar Rp1.982.300.900,- dengan rincian DPP Rp1.802.091.725,- ditambah PPN Rp180.209.172,- Pembayarannya secara cash diterima SOLAIMAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

14. Saksi ASIH WARASTUTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 52 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRI BUDI UTOMO;

- Bahwa saksi merupakan Kepala Bagian Keuangan di PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX;
- Bahwa PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017, sebagai berikut:
 - Dengan PG Tasikmadu Karanganyar berupa transaksi sewa traktor dan loader;
 - Dengan PG Mojo Sragen berupa transaksi sewa traktor dan loader serta jasa angkut ampas awur;
 - Dengan PG Rendeng Kudus berupa transaksi sewa traktor dan loader dan pengadaan BBA (bahan Bakar Alternatif) berupa saw dust. ;
 - Dengan PG Sragi Pekalongan berupa transaksi sewa traktor dan jasa antar jemput tenaga tebang tebu dan angkutan truk;
 - Dengan PG Pangka Tegal berupa transaksi jasa angkutan tebu dan antar jemput tenaga tebang tebu;
- a. Bahwa, masih ada hutang PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) dengan CV ASTI JAYA atas pekerjaan tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- b. Bahwa, setelah dilakukan rekonsiliasi dengan masing-masing PG, yaitu PG Sragi, PG Tasikmadu, PG Mojo, PG Pangka, PG Rendeng, PTPN IX dan Pihak CV Asti Jaya ternyata terdapat tagihan yang sudah terbayar tetapi tidak diterbitkan faktur pajak oleh CV ASTI JAYA, padahal PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) sudah melakukan pembayaran termasuk dengan PPN, atas tagihan yang sudah dibayarkan ke CV ASTI JAYA tetapi CV ASTI JAYA tidak menerbitkan faktur pajaknya, maka PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) memotongkan PPN yang sudah dibayar tersebut ke piutang CV ASTI JAYA Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, sehingga mengurangi sisa piutang CV ASTI JAYA. Setelah rekonsiliasi piutang CV ASTI JAYA ke PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tersebut menjadi sebesar Rp. menjadi sebesar Rp 64.073.157,-
- c. Bahwa atas klarifikasi hutang piutang tersebut sudah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi Hutang Piutang yang ditandatangani oleh ASIH WARASTUTI, DWI W NUGROHO, AGUNG ERRY W (perwakilan PTPN IX), AHMAD JUHRI (PG Pangka), JMP HANDAYA (PG Sragi), MUKTI TISNAWATI (PG Rendeng), KHOLIB YULIANTO (PG Mojo) dan ASRI BUDI UTOMO sebagai direktur CV Asti Jaya yang ditandatangani di

Halaman 53 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang pada tanggal 14 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli MUHAMMAD MAHFUD, di bawah sumpah pada pokoknya

memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini, adalah:

1) Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021;

2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021;

3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021;-

4) Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 1994 (UU PBB);

5) Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 (UU BPHTB);

6) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 2000 (UU Bea Meterai);

7) Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000 (UU Penagihan dengan Surat Paksa).

- Bahwa Perubahan Keenam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 29 Oktober 2021 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Undang-undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sejak diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 telah mengalami beberapa kali

Halaman 54 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berlaku untuk kewajiban perpajakan sejak 1 April 2022 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Sesuai pasal 1 angka 2 UU KUP, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU PPN, bahwa Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa Pasal 1 butir 23 Undang-undang PPN dijelaskan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (11) UU KUP, Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar;
- bahwa Memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 3 ayat (6) UU KUP, SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak;
- Bahwa Pasal 1 angka 7 UU KUP masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sedangkan Pasal 2A UU KUP menyatakan bahwa Masa Pajak sama dengan 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan paling lama 3 (tiga) bulan kalender;
- Bahwa Memperhatikan ketentuan penjelasan atas Pasal 1 ayat (11) UU KUP, bagi Pengusaha Kena pajak fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan:
 - Penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang
 - Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan

Halaman 55 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan / atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- Bahwa pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;
- Bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak;
- Bahwa Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak;
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan berdasarkan Pasal 13 ayat (1) wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf a atau huruf f dan/atau Pasal 16D; setiap penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf c; ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf g dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) huruf h. Faktur Pajak tersebut sebagai bukti telah melakukan pemungutan PPN bagi pihak penjual sedangkan bagi pihak pembeli sebagai bukti telah dipungut PPN oleh penjual barang dan/jasa. Pihak PKP sebagai penjual wajib melaporkan pemungutan PPN tersebut dalam SPT Masa PPN. PPN yang telah dipungut tersebut diperhitungkan dengan Pajak Masukan (Jika ada). Kerugian Negara akan timbul jika PKP sebagai penjual tidak melaporkan dalam SPT Masa PPN atas PPN yang telah dipungut;
- Bahwa Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara melihat faktur pajak keluaran yang tidak dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai penjual dalam pelaporan SPT Masa PPN. Penghitungan Kerugian Negara ini tidak tergantung apakah pihak PKP Pembeli melaporkan atau tidak Faktur Pajak sebagai bukti telah dipungut dalam SPT Masa PPN karena sebagai pembeli berhak mengkreditkan bukan wajib mengkreditkan.

Halaman 56 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak pembeli dapat menghitung PPN yang telah dipungut penjual sebagai biaya atau dikapitalisir dalam perhitungan Laba Ruginya;
- Bahwa Apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, kemudian PKP tersebut tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sesuai mekanisme PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan seluruhnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait, dalam hal ini jelas bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas Negara;
 - Bahwa apabila sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan atas penyerahan barang/jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, kemudian PKP tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait atau tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya, dengan demikian perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d atau huruf i UU KUP berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar dan /atau tidak lengkap atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar";
 - Bahwa apabila Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual dalam hal ini CV. ASTI JAYA telah dikreditkan oleh PKP Pembeli yaitu PT PABRIK GULA RAJAWALI II, PTPN IX PABRIK GULA SRAGI, PT PTPN IX PG PANGKAH TEGAL, PTPN IX PG MOJO RENDENG. Atas PPN tersebut seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000. Dengan tidak melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada Faktur Pajak tersebut. Hal ini menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara. Kerugian pada pendapatan negara setidaknya-tidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT

Halaman 57 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa PPN bagi PKP Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi PKP Pembeli. Dengan demikian perbuatan tersebut jelas melanggar hukum yaitu telah melanggar ketentuan dalam pasal 39 ayat (1) huruf d atau i Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

o Bahwa dalam perkara CV ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000, terdakwa ASRI BUDI UTOMO merupakan pengurus perusahaan yang melakukan tindak pidana sebagaimana pengertian Pasal 32 Undang-undang KUP, sehingga dapat dipidana terkait perbuatan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Ahli WULANDARI, dibacakan pendapatnya di depan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa ahli pernah ditunjuk dan diminta keterangan sebagai Ahli di bidang Perpajakan dalam kasus tindak pidana di bidang perpajakan;
 - Bahwa Nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima dari Pengusaha Kena Pajak adalah jumlah PPN yang seharusnya disetor oleh Pengusaha Kena Pajak dalam menjalankan kewajiban sebagai Pemungut Pajak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3A Undang-undang PPN, berkaitan dengan kegiatan usaha yang benar-benar dijalankannya;
 - Bahwa Pendapatan negara yang telah diterima adalah jumlah PPN yang telah disetor sesuai dengan bukti setor berupa Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Pemindah bukuan (Bukti Pbk);
 - Bahwa Kerugian pada pendapatan negara dihitung dengan cara mengurangi nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima dengan nilai pendapatan negara yang telah diterima;
 - Bahwa Dalam hal tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak adalah tidak menyetorkan pajak (PPN) yang telah dipungut, berlaku mekanisme penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK);
 - Bahwa Nilai pendapatan negara yang seharusnya diterima adalah seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum dalam faktur pajak keluaran yang diterbitkan Wajib Pajak / Pengusaha Kena Pajak yang bersangkutan, sedangkan nilai pendapatan negara yang telah diterima adalah kredit pajak

Halaman 58 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaporkan dalam SPT masa PPN sebesar seluruh nilai PPN yang telah dipungut yang tercantum dalam faktur pajak masukan dan jumlah PPN yang telah disetor sesuai dengan bukti setor (berupa SSP atau Bukti Pbk);

- Bahwa Dengan tidak melaporkan Faktur Pajak yang diterbitkan tersebut mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada Faktur Pajak tersebut. Hal ini menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Kerugian pada pendapatan negara setidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi PKP Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi PKP Pembeli sebagai lawan transaksi;
- Bahwa Apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, kemudian PKP tersebut tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sesuai mekanisme PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan seluruhnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait, dalam hal ini jelas bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas negara. Apabila Wajib Pajak yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), melakukan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak dan atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak tersebut telah dipungut PPN dan telah dibuatkan Faktur Pajaknya, kemudian PKP tersebut tidak menyetorkan PPN yang telah dipungutnya sesuai mekanisme PPN dan Faktur Pajak yang diterbitkan seluruhnya tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang disampaikan ke KPP terkait, dalam hal ini jelas bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, karena ada kewajiban yang tidak dilakukan oleh Wajib Pajak dan ada hak Negara yang tidak disetorkan ke kas Negara;
- Kepada AHLI ditunjukkan fakta-fakta yang terjadi pada CV. ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000 adalah sebagai berikut:

1. ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur CV ASTI JAYA NPWP : 03.000.984.9-506.000, disangka telah melakukan tindak

Halaman 59 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan /atau keterangan yang isinya tidak benar dan /atau tidak lengkap atau tidak melaporkan dan menyetorkan Pajak Keluaran (PPN) yang telah dipungut dari lawan transaksi selama periode Januari 2017 s.d. Desember 2017 ;

2. Ditunjukkan kepada AHLI :

1) Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh CV ASTI JAYA selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

NO	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	0100171745771 044	14-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	425 000
2	0300171745771 047	01-Jun-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	96.599. 853
3	0300171745771 048	10-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	56.460. 238
4	0100171745771 030	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	3.552. 500
5	0100171745771 031	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	5.177. 500
6	0100171745771 010	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.947. 500
7	0100171745771 011	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.999. 800
8	0100171745771 012	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	7.191. 600
9	0100171745771 013	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985. 000
10	0100171745771 014	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.384. 000
11	0100171745771 015	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.128. 000
12	0100171745771 016	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.883. 000
13	0100171745771 017	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985. 000
14	0100171745771 018	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.384. 000
15	0100171745771 019	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.014. 600
16	0100171745771 020	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	633 000
17	0100171745771 021	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	558 000
18	0100171745771 022	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.111. 800
19	0100171745771 023	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	781 800
20	0100171745771 024	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.582. 800
21	0100171745771 025	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	972 600
22	0100171745771 026	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985. 000
23	0100171745771 027	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985. 000
24	0100171745771 028	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.567. 500
25	0100171745771 029	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.698. 000
26	0100171745771 032	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	14.926. 250
27	0100171745771 033	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	49.244. 564
28	0100171745771 034	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.612. 000
29	0100171745771 035	'18-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	28.933. 350
30	0100171745771 036	'13-APR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	35.965. 959
31	0100171745771 040	'05-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.403. 850
32	0100171745771 042	'09-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.404. 960
33	0100171745771 045	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	10.499. 600
34	0100171745771 046	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	37.326. 750
35	0100171745771 049	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	3.078. 000
36	0100171745771 050	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.258. 550



37	0100171745771 052	'27-OCT- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	16.373. 140
38	0100171745771 055	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	180.209. 172
39	0100171745771 056	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.483. 870
40	0100171745771 057	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.940. 270
41	0100171745771 058	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	36.024. 000
42	0100171745771 060	'13-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	26.234. 820
43	0100171745771 061	'13-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	22.077. 056
44	011017174577 1059	'16-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.082. 700
45	0100171745771 054	06-NOV- 17	LAJUPERDANA INDAH	01.571.859.6- 038.000	3.743. 973
	JUMLAH				748.815. 925

2) Faktur Pajak (Pajak Masukan) atas Pembelian Barang/Jasa yang telah diterima oleh Wajib Pajak CV ASTI JAYA selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No.	FAKTUR PAJAK		Lawan Transaksi		Nilai PPN
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	
1	1000117241364 55	'01-MAR-17	KARYA ZIRANG UTAMA	014460810511 000	7,819,18 2
2	1001717824592 66	'12-APR-17	KARYA ZIRANG UTAMA	014460810511 000	7,851,00 0
3	0100171741937 001	'28-JUL-17	GENDHIS MULTI MANIS	027990571514 000	13,636,3 64
4	0100011747641 558	'01-AUG-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972503 000	7,272,72 7
5	0100011747641 559	'09-SEP-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972503 000	7,272,72 7
6	0100011747641 562	'01-NOV-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972503 000	7,272,72 7
7	0100201772889 127	'23-NOV-17	GENDHIS MULTI MANIS	027990571514 000	7,158,03 6
	JUMLAH				58,282,7 63

3) Pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk tahun pajak 2017 adalah sbb:

No.	Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	November	2017	9152A479QL1TO VG2	4112/111 00	25.250. 813	20- Mar- 18
2	Oktober	2017	F295A477SUL07 BG2	4112/111 00	16.373. 140	20- Mar- 18
3	Agustus	2017	08C35476NVS1R 4G2	4112/111 00	12.336. 550	20- Mar- 18
4	Juli	2017	049754751EF1VB G2	4112/111 00	47.826. 350	20- Mar- 18
5	Juni	2017	4452F4B3U4DNG 1G2	4112/111 00	1.403. 850	20- Mar-



						18
6	April	2017	<u>32F484743SBB2B G2</u>	4112/111 00	1.439. 400	20- Mar- 18
7	Maret	2017	<u>5A9BC4736FN00 EG2</u>	4112/111 00	94.120. 000	20- Mar- 18
8	Juli	2017	<u>4D42E3UDAV8KU P7P</u>	4112/119 00	56.460. 238	15- Agu- 17
9	Juni	2017	<u>466EA63SQ8Q8A 66P</u>	4112/119 00	96.599. 853	17- Jul- 17
	Jumlah				351.810. 194	

4) Isi dari SPT Masa PPN CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk masa pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Kudus adalah sbb :

Masa	BPS	P K	P M	KB (LB)	Tgl. Set or	Tgl. Lapor
Jan	S- 01009016/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	17/02/20 17
Feb	S- 01017680/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/03/20 17
Mar	S- 01023174/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	28/04/20 17
Apr	S- 01028085/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	26/05/20 17
Mei	S- 01029397/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	07/06/20 17
Jun	S- 05014426/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/07/20 17
Jul	S- 05021787/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	18/08/20 17
Agu	S- 05025046/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	13/09/20 17
Sep	S- 05033699/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	31/10/20 17
Okt	S- 05037484/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	20/11/20 17
Nov	S- 05044401/PPN111 1/WPJ.10 / KP.0803/2017	0	0	0	-	29/12/20 17
Des	S-	0	0	0	-	16/01/20

Halaman 62 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



05002973/PPN111 1/WPJ.10 KP.0803/2018	/					18
---	---	--	--	--	--	----

3. Fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yaitu:

1) Keterangan dari AGUNG SUTRISNO selaku Kepala Seksi

Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus :

- Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak , CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 mulai terdaftar di administrasi Kantor Pelayanan Pajak pada tanggal 17 Mei 2013;
- CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 telah dikukuhkan sebagai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Terhitung sejak 10 Juni 2013;
- Dalam tahun 2017 telah menerbitkan FAKTUR PAJAK sebanyak 25 Faktur Pajak kepada PT WASKITA KARYA, PT PG RAJAWALI, PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX dan PT LAJUPERDANA INDAH dengan total PPN Rp. 748.815.925,00
- CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pernah menerima faktur pajak masukan untuk masa pajak Januari 2017 s.d.Desember 2017 namun tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, yaitu:

No.	FAKTUR PAJAK		Lawan Transaksi		Nilai PPN
	Nomor	Tanggal	Nama	NPWP	
1	10001172413 6455	'01- MAR-17	KARYA ZIRANG UTAMA	014460810 511000	7.819, 182
2	10011718245 9266	'12- APR-17	KARYA ZIRANG UTAMA	014460810 511000	7.851, 000
3	010011717419 37001	'28-JUL- 17	GENDHIS MULTI MANIS	027990571 514000	13.636 ,364
4	01000117476 41558	'01- AUG-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972 503000	7.272, 727
5	01000117476 41559	'09- SEP-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972 503000	7.272, 727
6	01000117476 41562	'01- NOV-17	SEKAR BUMI PARAMA	746822972 503000	7.272, 727
7	01002017728 89127	'23- NOV-17	GENDHIS MULTI MANIS	027990571 514000	7.158, 036
	JUMLAH				58,282 ,763

- Pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 untuk tahun pajak 2017 adalah sbb:

No.	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	Novem ber	9152A479QL1T OVG2	4112/1110 0	25.250. 813	20-Mar- 18
2	Oktob er	F295A477SULQ 7BG2	4112/1110 0	16.373. 140	20-Mar- 18
3	Agustu s	08C35476NVS1 R4G2	4112/1110 0	12.336. 550	20-Mar- 18
4	Juli	04975475IEF1V BG2	4112/1110 0	47.826. 350	20-Mar- 18
5	Juni	4452F483U4DN G1G2	4112/1110 0	1.403. 850	20-Mar- 18
6	April	32F484743SBB 2BG2	4112/1110 0	1.439. 400	20-Mar- 18



7	Maret	5A9BC4736FN0 0EG2	4112/1110 0	94.120. 000	20-Mar- 18
8	Juli	4D42E3UDAV8 KUP7P	4112/1190 0	56.460. 238	15-Agu- 17
9	Juni	466EA63SQ8Q 8A66P	4112/1190 0	96.599. 853	17-Jul- 17
Jumlah				351.810. 194	

2) Keterangan dari HERRY RISWANDI Pegawai PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO):

- PT PABRIK GULA RAJAWALI II pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA berupa pekerjaan pembuatan drainase kebun;
- Faktur Pajak Masukan atas transaksi jasa yang diterima dari CV ASTI JAYA dan telah dikreditkan dalam SPT Masa PPN PT PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) tahun pajak 2017. Perincian Faktur Pajak tersebut adalah sebagai berikut:

NO	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN	Jumlah
	Nomor	Tanggal			
1	100171745 771030	7- Mar- 17	35,525, 000	3,552, 500	39,077, 500
2	100171745 771031	7- Mar- 17	51,775, 000	5,177, 500	56,952, 500
JUMLAH			87,300, 000	8,730, 000	96,030, 000

- Nilai pembayaran PT Rajawali sebesar Rp. 94.284.000. Nilai tagihan CV ASTI JAYA terhadap PT PABRIK GULA RAJAWALI II yaitu sebesar Rp 96.030.000. Sehingga ada selisih Rp. 1.746.000. Selisih merupakan PPH 23 yang dipotong oleh PT PG Rajawali II kepada CV Asti Jaya

3) KHOLIB YULIANTO selaku Manager Keuangan di PT SINERGI GULA NUSANTARA PG MOJO memberikan keterangan:

- Pabrik Gula Mojo pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA yaitu berupa transaksi sewa traktor dan jasa angkut ampas awur dalam tahun 2017;---
- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Mojo dalam tahun 2017 dan telah dikreditkan dalam SPT MASA PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017 adalah:

NO	No Faktur	Tangg	DPP	PPN
1	01001717457 74058	27- Okt 2017	163.731	16.373.1
2	01101717457 74058	16- Nov 2017	50.827	5.082.70
Jumlah			214.558 .400	21.455.5 40

- Jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Mojo dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 berdasarkan data yang saya dapat adalah sebagai berikut:

NO	No Faktur	Tanggal Faktur 2017	DPP	PPN	Jumlah	PPH 23	Jml Dibayar
1	010017174 5771052	27 Okt	163.731. 400	16.373. 140	55.90 9.700	1.01 6.54 0	54.89 3.160
2	011017174 5771059	16 Nov	50.827.0 00	5.082.7 00	180.1 04.54 0	3.27 4.62 8	176.8 29.91 2
Jumlah			214.558. 400	21.455. 540	236.0 14.24 0	4.29 1.16 8	231.7 23.07 2

4) DWI ENGGAR NOVIANTO Asisten Manager Keuangan PT Sinergi Gula Nusantara Pabrik Gula Sragi, Pekalongan memberikan keterangan:

- Pabrik Gula Sragi, Pekalongan pernah melakukan transaksi pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2016, yaitu berupa transaksi sewa traktor dan jasa antar jemput tenaga tebang tebu dan angkutan truk;

- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Sragi, Pekalongan dalam tahun 2017 dan telah dikreditkan dalam SPT MASA PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017 adalah:

NO	FAKTUR PAJAK		DPP	PPN
	Nomor	Tanggal		
1	01001717457 71032	16-MAR- 17	149,262 500	14,926,2 50
	01001717457 71033	16-MAR- 17	492,445 646	49,244,5 64
3	01001717457 71036	13-APR- 17	359,659 595	35,965,9 59
	JUMLAH		1.001.367,7 41	100.136,77 3

- Jumlah yang dibayarkan oleh Pabrik Gula Sragi, Pekalongan kepada CV ASTI JAYA atas transaksi tahun 2017 sebesar Rp1.081.477.161,- dengan rincian:

DPP	1,001,367,741
PPN	100,136,774
Jumlah	1,101,504,515
PPh Pasal 23	20,027,355
Jumlah Pembayaran	1,081,477,161

- 5) AGUNG ERY WARDHANA Administrasi Keuangan dan Umum (AKU) di PTPN IX di Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar memberikan keterangan:

- Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar pernah melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 pada tahun 2017, yaitu berupa transaksi sewa traktor dan sewa alat berat loader (All in);
- Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV ASTI JAYA, NPWP 03.000.984.9-506.000 kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) khususnya Pabrik Gula Tasikmadu, Karanganyar dalam tahun 2017 dan telah dikreditkan dalam SPT MASA PPN PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) tahun 2017 adalah:

NO	No Faktur	Tanggal	DPP	PPN
1	01001717457 71010	06 Maret 2017	59.475.00	5.947.500
2	01001717457 71011	06 Maret 2017	49.998.00	4.999.800
3	01001717457 71012	06 Maret 2017	71.910.00	7.191.600
4	01001717457 71013	06 Maret 2017	59.850.00	5.985.000
5	01001717457 71014	06 Maret 2017	63.840.00	6.384.000
6	01001717457 71015	06 Maret 2017	21.280.00	2.128.000
7	01001717457 71016	06 Maret 2017	48.830.00	4.883.000
8	01001717457 71017	06 Maret 2017	59.850.00	5.985.000
9	01001717457 71018	06 Maret 2017	63.63.84	6.384.000
10	01001717457 71019	06 Maret 2017	46.000	4.014.600
11	01001717457 71020	06 Maret 2017	6.330.00	633.000
12	01001717457 71021	06 Maret 2017	5.580.00	558.000
13	01001717457 71022	06 Maret 2017	11.118.00	1.111.800
14	01001717457 71023	06 Maret 2017	7.818.00	781.800
15	01001717457 71024	06 Maret 2017	45.828.00	4.582.800
16	01001717457 71025	06 Maret 2017	9.726.00	972.600
17	01001717457 71026	06 Maret 2017	598 50000	5.985.000



18	01001717457 71027	06 Maret 2017	59.8 50.000	5.985.000
19	01001717457 71028	06 Maret 2017	15.6 75.000	1.567.500
20	01001717457 71029	06 Maret 2017	26.9 80.000	2.698.000
21	01001717457 71034	16 Maret 2017	66.1 20.000	6.612.000
22	01001717457 71037	27 April 2017	7.518.00 0	751.800
23	01001717457 71038	27 April 2017	6.876.00 0	687.600
24	01001717457 71045	01 Juli 2017	104.99 6.000	10.499.60 0
25	01001717457 71046	01 Juli 2017	373.2 67.500	37.326.75 0
26	01001717457 71049	05 Agustus 2017	30.7 80.000	3.078.000
27	01001717457 71050	05 Agustus 2017	92. 585.500	9.258.550
28	01001717457 71056	10 Nopember 2017	94.8 38.700	9.483.870
29	01001717457 71057	10 Nopember 2017	69.4 02.700	6.940.270
30	01001717457 71058	10 Nopember 2017	360.2 40.000	36.024.00 0
	Jumlah		1.994.40 4.400	199.440.44 0

- Jumlah pembayaran atas transaksi antara Pabrik Gula Tasikmadu dengan CV ASTI JAYA dalam tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.134.451.211,20 termasuk PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 23.

- a. Setelah melihat fakta-fakta tersebut AHLI menjelaskan bahwa telah terjadi potensi kerugian pada pendapatan Negara karena CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 sebagai PKP Penjual telah menerbitkan Faktur Pajak kepada lawan transaksi/pembeli dan Faktur Pajak tersebut telah dikreditkan oleh PKP Pembeli sehingga bisa dikatakan bahwa CV ASTI JAYA, telah memungut PPN yang telah dibayarkan oleh para pembeli tersebut. Atas PPN tersebut seharusnya dilaporkan dalam SPT Masa PPN CV ASTI JAYA masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 dan disetorkan ke Kas Negara, tetapi faktur pajak atas pemungutan PPN-nya tidak disetorkan oleh CV ASTI JAYA. Hal ini mengakibatkan setoran PPN ke Kas Negara menjadi berkurang sebesar jumlah PPN pada Faktur Pajak tersebut, sehingga menimbulkan adanya kerugian pada pendapatan negara. Kerugian pada pendapatan negara setidaknya adalah sebesar nilai PPN yang tertera pada Faktur Pajak yang diterbitkan yang seharusnya merupakan Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN bagi PKP Penjual dan Pajak Masukan pada SPT Masa PPN bagi PKP Pembeli;
- b. Berdasarkan barang bukti dan keterangan yang diperlihatkan kepada saya oleh penyidik dalam perkara CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000, jumlah pajak pertambahan nilai yang sengaja tidak disetor sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d atau huruf i Undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dapat diuraikan sebagai berikut:

2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: dapat dirakun sebagai berikut:				
URAIAN		MENURUT		KERUGIAN NEGARA (Rp)
		SPT / WP (Rp)	AHLI (Rp)	
PPN/PPn. BM				
PPN Dalam Negeri				
1	Eksport	0	0	0
	Peny. PPN-nya dipungut		7.488.159.25	7.488.159.25
2	sendiri	0	0	0
3	Penv. PPN-nya digunggung	0	0	0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	0	0	0
5	Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
6	Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	0
7	Return Penyerahan	0	0	0
	Jumlah Penyerahan	0	7.488.159.25	7.488.159.25
1	Pajak Keluaran PK dipungut Pemungut	0	748.815.925	748.815.925
2	PPN	0	0	0
3	PPN atas Return Penyerahan	0	0	0
	Pajak Keluaran Harus Dipungut	0	748.815.925	748.815.925
1	Pajak Masukan Import	0	0	0
2	Pajak Masukan Dalam Negeri	0	58.282.763	58.282.763
3	PM MTS Import	0	0	0
4	PM MTS Dalam Negeri	0	0	0
5	Return Pembelian	0	0	0
6	Kompen. PPN Masa Sebelumnya	0	0	0
7	Setoran	0	351.810.194	351.810.194
8	Lain-lain	0	0	0
	Jumlah Kredit Pajak	0	410.092.957	410.092.957
	PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	338.722.968	338.722.968

Dengan demikian, jumlah PPN yang masih harus dibayar berdasarkan perhitungan adalah sebesar Rp. 338.722.968,- atau tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh delapan Rupiah;

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUKIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal terdakwa sejak kecil dan rumah saksi dekat dengan rumah terdakwa sekitar 4 rumah dari rumah saksi kurang lebih 100m;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi terdakwa dulu petani kemudian mendirikan CV Asti Jaya Asri.
 - Bahwa, sepengetahuan saksi CV Asti Jaya Asri bergerak dalam bidang Alat berat dan pertanian.
 - Bahwa, mulai tahun berapa saksi tidak tahu dan sudah lama berdirinya;
 - Bahwa, setuju saksi ada pernah kerja dengan Pabrik Gula Rendeng dalam pekerjaan pertanian tebu;
 - Bahwa, kemungkinan bergerak dalam pertanian dalam penanaman, mungkin juga bergerak di bidang alat-alatnya, bisa juga bergerak di bidang pembukaan lahan;
 - Bahwa, setuju saksi CV Asti Jaya Asri sekarang pailit;
 - Bahwa, setuju saksi pailit terdakwa rumahnya sampai sudah ada pengawasan dari Bank dan rumahnya sudah tidak ditempati;
 - Bahwa, rumah yang tidak ditempati itu berada di Desa Wergu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi sekarang terdakwa tidak dengan istrinya lagi, hanya dengan anak-anaknya;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah bangkrut, tahunnya rumahnya sudah tidak ditempati sekitar 1 tahun lebih;
 - Bahwa, setahu saksi terdakwa ikut kakaknya yang di Desa Panjang;
 - Bahwa, setahu saksi dihadirkan dipersidangan ini ada masalah pajak;
 - Bahwa, terakhir terdakwa tinggal di rumah yang sudah kosong tahun tahun 2023;
 - Bahwa, Saksi pernah bekerja dengan terdakwa ketika ibunya terdakwa meminta tolong pada saksi hanya itu saja;
 - Bahwa, saksi tidak tahu rumahnya Terdakwa sudah dalam pelelangan atau sudah ada yang terjual;
 - Bahwa, Saksi katakan di rumah Terdakwa ada tulisan pengawasan Bank dan sudah berlangsung hampir 1 tahun;
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada rumah Terdakwa yang lain yang disita Bank;
- Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti surat di persidangan,

yaitu:

1. Surat Perjanjian Kerja Nomor: REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017, diberi bukti T-1;
2. Surat Perjanjian Kerja Sewa/Ikatan Kerja Penggunaan Traktor untuk Menarik Tebu di Emplasemen PG. Mojo Sragen, diberi bukti T-2;
3. Surat Perjanjian Kerja Nomor: Ren/023/SPK/2017 tanggal 8 Juni 2017, diberi bukti T-3; dan
4. Surat Keterangan Outstanding tanggal 29 Juli 2021, diberi bukti T-4;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa Sebagai Direktur di CV ASTI JAYA sejak tahun 2013;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa didampingi oleh HERI PRACIKTO, S.H dari Kantor Advokat HERI PRACIKTO, S.H;
- Kepada terdakwa ditunjukkan Akta Pendirian CV ASTI JAYA No. 01 tanggal 16 Mei 2013 Notaris MUNZAROH, SH. M.Kn. Setelah melihat Terdakwa menjelaskan susunan pengurus CV ASTI JAYA adalah:

No	Nama	Alamat	Jabatan
1	ASRI BUDI UTOMO	Desa Wergu Wetan RT 05 RW 04, Kudus	Direktur
2	DWI PRASETIA FENDI	Desa Wergu Wetan RT 05 RW 04, Kudus	Pesero

- Bahwa pada saat pendirian CV ASTI JAYA tidak ada modal yang diseto

Halaman 68 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV ASTI JAYA memiliki kegiatan usaha dibidang:
 - Menyewakan traktor kepada petani melalui Pabrik Gula;
 - Mengangkut ampas dari Pabrik Gula Trangkil di Pati ke Pabrik Gula Rendeng di Kudus;
 - Menyewakan Traktor, Loader dan Eskavator
- Bahwa lokasi usaha CV ASTI JAYA:
 - di Jalan Jalan Patimura No. 06, RT. 005/RW.004, Werguwetan, Kudus
 - Kemudian Sejak awal 2018 pindah ke rumah Ibu Saya di Werguwetan RT 005/RW 004, no. 277 A, Werguwetan, Kudus
- Bahwa CV ASTI JAYA telah memiliki NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) terdaftar Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus;
- Bahwa CV ASTI JAYA sudah menjadi PENGUSAHA KENA PAJAK sejak tanggal 10 Juni 2013;
- Bahwa Costumer CV ASTI JAYA pada tahun 2017:
 - PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta;
 - PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk di Gedung WASKITA Jalan MT HARYONO Kav. No. 10, Cawang, Jakarta;
 - PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) di Subang. Dalam Sewa tersebut tanpa ada perjanjian dan SPK karena insidentil dan dibayar tunai;
 - PT LAJU PERDANA INDAH di Pati
- Bahwa terdakwa yang menandatangani SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) atas Penyerahan jasa CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk dan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero)
- Bahwa Faktur Pajak tersebut yang telah diterbitkan terdakwa melalui CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH pada tahun 2017, yaitu:

NO	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	0100171745771 044	14-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 5-093.000	425.000
2	0300171745771 047	01-Jun-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 5-093.000	96.599.853
3	0300171745771 048	10-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614 5-093.000	56.460.238
4	0100171745771 030	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644 2-051.000	3.552.500
5	0100171745771 031	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644 2-051.000	5.177.500
6	0100171745771 010	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 4-051.000	5.947.500
7	0100171745771 011	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 4-051.000	4.999.800

Halaman 69 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	0100171745771 012	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	7.191.600
9	0100171745771 013	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
10	0100171745771 014	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	6.384.000
11	0100171745771 015	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	2.128.000
12	0100171745771 016	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	4.883.000
13	0100171745771 017	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
14	0100171745771 018	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	6.384.000
15	0100171745771 019	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	4.014.600
16	0100171745771 020	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	633.000
17	0100171745771 021	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	558.000
18	0100171745771 022	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	1.111.800
19	0100171745771 023	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	781.800
20	0100171745771 024	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	4.582.800
21	0100171745771 025	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	972.600
22	0100171745771 026	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
23	0100171745771 027	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	5.985.000
24	0100171745771 028	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	1.567.500
25	0100171745771 029	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	2.698.000
26	0100171745771 032	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	14.926.250
27	0100171745771 033	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	49.244.564
28	0100171745771 034	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	6.612.000
29	0100171745771 035	'18-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	28.933.350
30	0100171745771 036	'13-APR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	35.965.959
31	0100171745771 040	'05-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	1.403.850
32	0100171745771 042	'09-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	4.404.960
33	0100171745771 045	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	10.499.600
34	0100171745771 046	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	37.326.750
35	0100171745771 049	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	3.078.000
36	0100171745771 050	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	9.258.550
37	0100171745771 052	'27-OCT-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	16.373.140
38	0100171745771 055	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	180.209.172
39	0100171745771 056	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	9.483.870
40	0100171745771 057	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	6.940.270
41	0100171745771 058	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	36.024.000
42	0100171745771 060	'13-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	26.234.820
43	0100171745771 061	'13-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	22.077.056
44	'0110171745771 059	'16-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137 .4-051.000	5.082.700
45	0100171745771 054	06-NOV-17	LAJUPERDANA INDAH	01.571.859 .6-038.000	3.743.973
	JUMLAH				7 4 8 . 8 1 5 . 9 2 5

- Bahwa terdakwa selaku DIREKTUR CV ASTI JAYA yang menandatangani Faktur Pajak atas Penjualan/penyerahan jasa CV ASTI JAYA kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH pada tahun 2017;

Halaman 70 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kepada terdakwa ditunjukkan SPT MASA PPN Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 a.n CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 yang telah disampaikan ke KPP Pratama Kudus:

Masa	BPS	P K	PM	KB/ (LB)	Tgl.S etor	Tgl. Lapor
Jan	S- 01009016/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	17/02/ 2017
Feb	S- 01017680/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	31/03/ 2017
Mar	S- 01023174/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	28/04/ 2017
Apr	S- 01028085/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	26/05/ 2017
Mei	S- 01029397/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	07/06/ 2017
Jun	S- 05014426/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	13/07/ 2017
Jul	S- 05021787/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	18/08/ 2017
Agu	S- 05025046/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	13/09/ 2017
Sep	S- 05033699/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	31/10/ 2017
Okt	S- 05037484/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	20/11/ 2017
Nov	S- 05044401/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2017	0	0	0	-	29/12/ 2017
Des	S- 05002973/PPN1111/WPJ.10/ KP.0803/2018	0	0	0	-	16/01/ 2018

setelah melihat terdakwa menjelaskan:

- SPT MASA PPN Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 tersebut milik CV ASTI JAYA yang disampaikan ke KPP Pratama Kudus
- Nama yang tercantum dalam kolom tandatangan pada SPT MASA PPN Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 tersebut milik CV ASTI JAYA adalah nama terdakwa;
- Atas 45 Faktur Pajak yang saya terbitkan selama tahun 2017 dengan DPP Rp. 7.488.159.250 dan PPN sebesar Rp. 748.815.925 belum dilaporkan dalam SPT MASA PPN masa Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 a.n CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000

Halaman 71 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum menyetorkan seluruh PPN yang telah dipungut dan masih kurang sekitar Rp. 397 juta-an karena pembayaran dari pihak rekanan diantaranya PT PERKEBUNANAN NUSANTARA IX pembayarannya tidak sesuai dengan SURAT PERJANJIAN KERJA yang telah disepakati, sehingga pembayaran mundur dan apabila ada pembayaran digunakan untuk modal pekerjaan kontrak pekerjaan di tahun berikutnya. Karena pembayaran selalu mundur maka terdakwa harus meminjam dana pihak ketiga untuk menyelesaikan pembayaran operasional pekerjaan. Sehingga hal tersebut menjadi kendala untuk melunasi PPN yang telah saya pungut ditahun 2017;
- Bahwa terdakwa pernah menerima Surat Himbuan dari KPP Patama Kudus terkait Data PKPM tahun 2017 atas penerbitan FAKTUR PAJAK dengan nilai PPN sebesar Rp. 748.815.926,- sesuai dengan surat himbuan yang ditujukan kepada CV ASTI JAYA sesuai Surat nomor SP2DK-2032/WPJ.10/KP.08/2019 tanggal 07 Januari 2019 yang ditunjukkan kepada terdakwa;
- Atas PPN yang telah dipungut sebesar Rp. 748.815.926,-, saya baru melakukan penyetoran sebesar Rp. 351.810.194,-, sedangkan sisanya belum saya bayarkan karena saya tidak memiliki uang;
- Rekening untuk menampung hasil PENJUALAN CV ASTI JAYA pada tahun 2017:
 - Rekening BNI Cabang Kudus nomor 0503154461;
 - Bank Jateng Cabang Kudus nomor 1024005794 ;
 - BRI Cabang Kudus nomor 003801001735304
- Bahwa penyidik telah menyampaikan kepada terdakwa, bahwa Penyidikan terkait dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui CV ASTI JAYA seperti yang dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf d atau huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Disampaikan juga bahwa Wajib Pajak masih memiliki hak sesuai pasal 44B UU KUP sebagai berikut:
 - Pasal 44B ayat (1) : Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Halaman 72 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan:

- Pasal 44B ayat (2) : Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah Wajib Pajak atau Terdakwa melunasi:

Huruf b kerugian pada pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa, Terdakwa mengerti dengan penjelasan penyidik namun tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembayaran karena sudah tidak memiliki uang lagi.

- Bahwa pada saat ini terdakwa sudah tidak memiliki Aktiva/Harta lagi. Atas tanah dan bangunan yang dimiliki pada saat ini karena:

- Tanah dan Bangunan terletak di Desa Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, luas 330m2 sesuai SHM No.202, tanggal 17-10-1981 atas nama ASRI BUDI UTOMO; sedang dalam proses lelang BRI Cabang Kudus;

- Tanah dan Bangunan terletak di Desa Wergu Wetan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, luas 119m2 sesuai SHM No.887, tanggal 06-11-2006 atas nama ASRI BUDI UTOMO; sedang dalam proses lelang BRI Cabang Kudus;

- Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Terban Indah, Desa Terban, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, luas 84m2 sesuai SHM No.3553, tanggal 01-11-2002, atas nama 1.ASRI BUDI UTOMO, 20/05/1978 dan 2.DWI PRASETIA FENDI, 25/12/1985; sedang dalam proses lelang BRI Cabang Kudus;

- Bahwa terdakwa telah menerbitkan 45 (empatpuluh lima) Faktur Pajak dengan nilai PPN yang telah dipungut sebesar Rp. 748.815.925,- dan 7 (tujuh) Faktur Pajak Masukan yang di terima sebesar Rp. 58,282,763,-, suluruhnya tidak di laporkan dalam SPT MASA PPN Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 a.n CV ASTI JAYA, karena laporan dalam SPT MASA PPN Masa Januari 2017 s.d Masa Desember 2017 yang saya sampaikan ke KPP Pratama Kudus adalah *NIHIL*;

- Bahwa Setelah dilakukan rekonstruksi Piutang CV ASTI JAYA antara dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX yang juga dihadiri oleh Bu ASIH WARASTUTI pada tanggal 14 Juni 2023

Halaman 73 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



ternyata sisa Piutang CVV ASTI JAYA tersisa sebesar Rp. 64.073.157,- karena ternyata PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX telah melakukan pembayaran secara mengangsur dan kadang pembayaran tersebut diberikan untuk modal pekerjaan proyek selanjutnya;

- Bahwa Atas Pekerjaan CV ASTI JAYA dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX selama tahun 2018 s.d 2020 dengan total Rp. 3.411.839.009 belum diterbitkan Faktur Pajaknya oleh CV ASTI JAYA;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- [illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur pajak no. 010-017-17.45771010 1 lembar AGUNG ERRY WARDHANA
Nurhayanto, AgungW, Mildan S
4. Faktur pajak no. 010-017-17.45771011 1 lembar s.d.a s.d.a
5. Faktur pajak no. 010-017-17.45771012 1 lembar s.d.a s.d.a
6. Faktur pajak no. 010-017-17.45771013 1 lembar s.d.a s.d.a
7. Faktur pajak no. 010-017-17.45771014 1 lembar s.d.a s.d.a
8. Faktur pajak no. 010-017-17.45771015 1 lembar s.d.a s.d.a
9. Faktur pajak no. 010-017-17.45771016 1 lembar s.d.a s.d.a
10. Faktur pajak no. 010-017-17.45771017 1 lembar s.d.a s.d.a
11. Faktur pajak no. 010-017-17.45771018 1 lembar s.d.a s.d.a
12. Faktur pajak no. 010-017-17.45771019 1 lembar s.d.a s.d.a
13. Faktur pajak no. 010-017-17.45771020 1 lembar s.d.a s.d.a
14. Faktur pajak no. 010-017-17.45771021 1 lembar s.d.a s.d.a
15. Faktur pajak no. 010-017-17.45771022 1 lembar s.d.a s.d.a
16. Faktur pajak no. 010-017-17.45771023 1 lembar s.d.a s.d.a
17. Faktur pajak no. 010-017-17.45771024 1 lembar s.d.a s.d.a
18. Faktur pajak no. 010-017-17.45771025 1 lembar s.d.a s.d.a
19. Faktur pajak no. 010-017-17.45771026 1 lembar s.d.a s.d.a
20. Faktur pajak no. 010-017-17.45771027 1 lembar s.d.a s.d.a
21. Faktur pajak no. 010-017-17.45771028 1 lembar s.d.a s.d.a
22. Faktur pajak no. 010-017-17.45771029 1 lembar s.d.a s.d.a
23. Faktur pajak no. 010-017-17.45771034 1 lembar s.d.a s.d.a
24. Faktur pajak no. 010-017-17.45771045 1 lembar s.d.a s.d.a
25. Faktur pajak no. 010-017-17.45771048 1 lembar s.d.a s.d.a
26. Faktur pajak no. 010-017-17.45771049 1 lembar s.d.a s.d.a
27. Faktur pajak no. 010-017-17.45771050 1 lembar s.d.a s.d.a
28. Faktur pajak no. 010-017-17.45771056 1 lembar s.d.a s.d.a
29. Faktur pajak no. 010-017-17.45771057 1 lembar s.d.a s.d.a
30. Faktur pajak no. 010-017-17.45771058 1 lembar s.d.a s.d.a
Dokumen PG. TASIK MADU KRA
31. Fotokopi Rekapitulasi Fajak Masukan 2 lembar s.d.a s.d.a
32. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010008 dan kuitasi pembayaran
no.24010008 2 lembar s.d.a s.d.a
33. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 1 ags sd 15 agt
2016 1 lembar s.d.a s.d.a
34. Fotokopi Rekapam jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 1 lembar
s.d.a s.d.a

Halaman 75 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Srt perjanjian kerja no. TAS/SPK/078/VII/2016 1 set s.d.a s.d.a
36. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010009 dan kuitasi pembayaran no.24010009 3 lembar s.d.a s.d.a
37. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 16/8 sd 31/08/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
38. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010010 dan kuitasi pembayaran no.24010010 2 lembar s.d.a s.d.a
39. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 01/9 sd 15/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
40. Fotokopi Rekap jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 01/9 sd 15/9/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
41. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010011 dan kuitasi pembayaran no.24010011 2 lembar s.d.a s.d.a
42. Fotokopi Rekap jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 16/09 sd 30/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
43. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 16/09 sd 30/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
44. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010012 dan kuitasi pembayaran no.24010012 3 lembar s.d.a s.d.a
45. Fotokopi Rekap jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 01/10 sd 15/10/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
46. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 01/10 sd 15/10/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
47. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010013 dan kuitasi pembayaran no.24010013 2 lembar s.d.a s.d.a
48. Fotokopi Absensi traktor periode 16 s/d 30 sep 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
49. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (24010013) 1 lembar s.d.a s.d.a
50. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501005 dan bukti tranfer no 0501005 2 lembar s.d.a s.d.a
51. Fotokopi Absensi traktor periode 16 s/d 31 ags 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
52. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010005) 1 lembar s.d.a s.d.a
53. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501004 dan bukti tranfer no 0501004 2 lembar s.d.a s.d.a
54. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 sep 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
55. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010004) 1 lembar s.d.a s.d.a
56. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501006 dan bukti tranfer no 0501006 2 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 76 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 ags 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
58. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010006) 1 lembar s.d.a s.d.a
59. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010007 dan kuitasi pembayaran no 24010007 2 lembar s.d.a s.d.a
60. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 Okt 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
61. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (2401007) 1 lembar s.d.a s.d.a
62. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.10020001 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
63. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.10020001 1 lembar s.d.a s.d.a
64. Fotokopi Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 1 Oktober s/d 15 Okt 2016 No.10020001 1 lembar s.d.a s.d.a
65. Fotokopi Bukti transfer No. 10020001 pembayaran loader 1-15 Okt 16 dari PG Tasikmadu ke CV Asti Jaya 1 lembar s.d.a s.d.a
66. Fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank No.10020000 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
67. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.10020000 1 lembar s.d.a s.d.a
68. Fotokopi Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 16 Oktober s/d 31 Okt 2016 No.10020000 1 lembar s.d.a s.d.a
69. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT PPh Pasal 23/26 No. S-01010605/PPH23/WPJ.32/KP.0703/2017 tanggal 14-03-2017, Bukti Penerimaan Negara NTPN273F22BLGVU3JGA1, dan SPT PPh Pasal 23/26 Masa 02/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
70. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010000 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
71. Fotokopi Bukti transfer No. 05010000 pembayaran loader 1-15 Juli 16 dari PG Tasikmadu ke Asri Budi Utomo 1 lembar s.d.a s.d.a
72. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.05010000 1 lembar s.d.a s.d.a
73. Fotokopi Absensi Operator Loader Tanggal 16 Juni s/d 30 Juni 2016 No. 05010000 1 lembar s.d.a s.d.a
74. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat No.TAS/SPK/020/IV/2016 tanggal 12 April 2016 1 set s.d.a s.d.a
75. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010001 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
76. Fotokopi Bukti transfer No. 05010001 pembayaran loader 16-31 Juli 16 dari PG Tasikmadu ke Asri Budi Utomo 1 lembar s.d.a s.d.a
77. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.05010001 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 77 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Fotokopi Absensi Operator Loader Tanggal 16 Juli s/d31 Juli 2016 No. 05010001 1 lembar s.d.a s.d.a
79. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Barat No.TAS/SPK/020/IV/2016 tanggal 12 April 2016 1 set s.d.a s.d.a
80. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010004 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln Agustus TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
81. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010003 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln Agustus TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
82. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.08030005, kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader, Bukti Transfer, SPT PPh Pasal 23/26 Masa 3/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
83. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010005 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln September TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
84. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010002 dan Kuitansi pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader 1 s.d. 15 Agustus 2016, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
85. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010006 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bulan September TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 16 September s/d 30 September 2016 1 set s.d.a s.d.a
86. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010003 dan Kuitansi pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader 16 s.d. 31 Agustus 2016, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
87. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100000 dan Kuitansi Pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader, Absensi Traktor, Berita Acara Pemakaian Traktor; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100001 dan Kuitansi Pembayaran, Absensi Traktor, Berita Acara Pemakaian Traktor, SPT PPh Pasal 23/26 Masa 10/2017 a.n. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
88. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100003 s.d. No.28100009 1 set s.d.a s.d.a
89. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100002 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100003 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara

Halaman 78 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100004 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100005 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100006 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100007 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader. 1 set s.d.a s.d.a

90. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.31870053 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Muat, Angkut dan Bongkar Ampas Awul, Rekap Penerimaan Ampas Awul, Rekap Awul, Surat Perjanjian Kerja No. TAS/SPK/025/VII/2017, SPT PPh Pasal 23/26 Masa 7/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
91. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Tebu di Emplasemen Untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
92. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Muat, Angkut dan Bongkar Muat Ampas Awul PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 1 set s.d.a s.d.a
93. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Gula SHS Stampor ke Gudang Penyimpanan untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 06 Juli 2017 1 set s.d.a s.d.a
94. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Tebu di Emplasemen Untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2016 No. TAS/SPK/028/VI/2016 tanggal 28 Mei 2016 1 set s.d.a s.d.a
95. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat Loader (ALL IN) Jam Operasional 4 Jam Stand By (Setiap hari) untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 03 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
96. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Gula SHS Stampor ke Gudang Penyimpanan untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2016 No. TAS/SPK/078/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 1 set s.d.a s.d.a
97. Faktur Pajak (PK) 010.017-17.457771035 tgl 18/3/2017 1 lembar MUKTI TISNAWATI, SE Nurhayanto, Budhi S, Moestakim
98. Faktur Pajak (PK) 010.017-17.457771040 tgl 05/6/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
99. Rincian pembayaran saw dust dan pembayaran sewa traktor 1 lembar s.d.a s.d.a
100. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 16 okt sd 02 des dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
101. SPT Masa PPh 23 Masa maret 2017 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 79 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 11 sd 15 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
103. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 sd 15 sep dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
104. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 1 sd 10 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
105. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 sd 10 sep dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
106. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 21 sd 31 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
107. Bukti transfer atas pembayaran sewa 21 sd 31 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
108. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 11 sd 20 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
109. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 sd 20 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
110. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 1 sd 10 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
111. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 sd 10 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
112. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya 21 sd 31 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
113. Bukti transfer atas pembayaran sewa 21 Juli sd 31 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
114. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 11 sd 20 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
115. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 Juli sd 20 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
116. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 1 sd 10 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
117. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 Juli sd 10 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
118. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya periode 1 sd 10 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
119. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 13 sd 20 jun 1 bendel s.d.a s.d.a

Halaman 80 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya periode 03 sd 12 jun 1 bendel s.d.a s.d.a
121. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust sesuai SP-REN/SPK.018/2015 ; 25 mei 2017 dan bukti pendukung lainnya ,faktur 010.17-17.45771060 1 bendel s.d.a s.d.a
122. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 10 &11 Juni 2017 dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
123. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 10 & 11Juni 1 lembar s.d.a s.d.a
124. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust tgl 17 &20 Agustus 2017 dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
125. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust tgl 31 Agustus 2017 dan 10 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
126. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 31 Agst sd 10 sep 1 lembar s.d.a s.d.a
127. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 08,09,dan 11 juni dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
128. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 08,09, 11Juni 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
129. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 25 Mei &21 juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
130. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 25 Mei&21 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
131. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 19 ,20 juni 2017 juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
132. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 28 mei,17 ,18 juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
133. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 mei, 1 bendel s.d.a s.d.a
134. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 25 mei,dan 13 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
135. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei&13 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
136. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 12 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
137. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 8 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
138. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 8 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
139. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 1 bendel s.d.a s.d.a

Halaman 81 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 26 Mei 2017 1 set s.d.a s.d.a
141. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 06Juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
142. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 06 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
143. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 03Juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
144. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 sebanyak 97300kg x 285,- 1 bendel s.d.a s.d.a
145. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 sebanyak 95750kg x 285,- 1 bendel s.d.a s.d.a
146. Pembayaran piutang 1 set ASRI BUDI UTOMO Nurhayanto,BudhiSuryanto,Moestakim
147. Rekening BNI Plus 0813900032 1 bendel s.d.a s.d.a
148. Rekening BCA no 0312533357 1 bendel s.d.a s.d.a
149. Rekening BNI cab Kudus 0503154461 1 set s.d.a s.d.a
150. Rek bank jateng 1024005794 1 set s.d.a s.d.a
151. SPT Tahunan 2017dan SPT Masa PPh dan PPN 1 bendel s.d.a s.d.a
152. Bukti invoice PT. Barata Indonesia dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
153. Akte pendirian Perusahaan 1 bendel s.d.a s.d.a
154. Surat perjanjian kerja muat angkut dan bongkar muat ampas awul PT Tasikmadu th 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
155. Surat Perjanjian Kerja (SPK) no. SR.A /SPK/016/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
156. Surat Perjanjian Kerja PG Sragi No. SRA/SPK/025/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
157. Surat perjanjian kerja PG Mojo Sragen dgn CV. ASTI Jaya No. MJO/X/SPK/022/VII/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
158. Surat perjanjian Kerja dengan PG. Rendeng No. REN/022/SPK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
159. Surat perjanjian kerja dengan PG Tasikmadu no. Tas/SPK/024/VII/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
160. Surat Perjanjian kerja dengan PG. RendengNo.REN/044/SpK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
161. Surat Perjanjian kerja dengan PG. RendengNo.REN/023/SpK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
162. Outstanding piutang cv Asti Jaya dan rekap tagihan 1 set s.d.a s.d.a
163. Surat Perjanjian angkutan tebu dgn PG Pangka no. PAN /SPK/018/2017 1 bendel s.d.a s.d.a

Halaman 82 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. Surat Perjanjian kerja sewa alat berat loader PG Tasikmadu 1 bendel s.d.a s.d.a
165. Surat Perintah Kerja No. 34/SPK- SUB/WK/PBTR.4/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
166. Surat pemeritahuan No. 522/BLR-DO/LT-A/IX/2018 1 set s.d.a s.d.a
167. Tagihan ke tiga puluh ampas ampas pg Trangkil Pati No. 76/KEU/05/2021 1 set s.d.a s.d.a
168. Outsanding kewajiban No. 313/AJ/XII/2019 1 set s.d.a s.d.a
169. Info Jatuh tempo an CV Asti Jaya 1 set s.d.a s.d.a
170. Persetujuan Permohonan Kredit 1 set s.d.a s.d.a
171. Surat Peringatan I & II dari BRI 1 set s.d.a s.d.a
172. Buku Tanah no 5975747 1 bendel s.d.a s.d.a
173. Sertifikat tanah No. 2670 th 1981 1 set s.d.a s.d.a
174. Sertifikat hak mili no. 3553 1 set s.d.a s.d.a
175. Surat ukur no. 77/Prbn/2002 1 set s.d.a s.d.a
176. Surat ukur no. 255/wergu wetan/2005 1 set s.d.a s.d.a
177. In house transfer (Nilai pembayaran) 1 lembar HERRY RISWANDI Rudi Hartono, Agung W, Mildan S
178. SPK NO. 41480-HJ/PESWA/16.169/SPK tanggal 11 November 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
179. Berita Acara Penerimaan Barang-Bahan-Pekerjaan 41480-HJ/PESWA/17.0089 1 lembar s.d.a s.d.a
180. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Excavator Periode 23 November s.d. Desember 2017 beserta lampiran time sheet 1 set s.d.a s.d.a
181. Invoice No. INV02032017 Tanggal 7-Mar-17 1 lembar s.d.a s.d.a
182. Faktur Pajak No. 010.017-17.45771031 tanggal 07 Maret 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
183. Kuitansi No. KW02032017 1 lembar s.d.a s.d.a
184. Bukti keluar kas/bank pembayaran sewa dan PPN No. TUK170313-0025 1 lembar s.d.a s.d.a
185. Bukti Masuk kas/bank atas PPh Pasal 23 No. TUK170313-0045 1 lembar s.d.a s.d.a
186. SPK NO. 41480-HJ/PESWA/16.180/SPK tanggal 27 Desember 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
187. Berita Acara Penerimaan Barang-Bahan-Pekerjaan 41480-HJ/PESWA/17.0103 1 lembar s.d.a s.d.a
188. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Excavator Periode 24 Desember 2016 s.d. 29 Januari 2017 beserta lampiran time sheet 1 set s.d.a s.d.a
189. Invoice No. INV01032017 Tanggal 7-Mar-17 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 83 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190. Faktur Pajak No.010.017-17.45771030 tanggal 07Maret 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
191. Kuitansi No.KW01032017 1 lembar s.d.a s.d.a
192. Bukti keluar kas/bank pembayaran sewa dan PPN No.TUK170313-0024 1 lembar s.d.a s.d.a
193. Bukti Masuk kas/bank atas PPh Pasal 23No.TUK170313-0044 1 lembar s.d.a s.d.a
194. Surat Perjanjian PAN/SPK/018/2017 1 bendel AHMAD JUHRI Rudi hartono,AgungWidarta,Mildan S
195. Faktur Pajak no.010.017-17.45771055 tgl 10/11/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
196. Surat Kuasa ASRI BUDI UTOMO kepada M. SOLAIMAN tanggal 17 Juli 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
197. Bukti keluar kas No.2308174 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
198. Bukti keluar kas No.2308175 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
199. Bukti keluar kas No.2308176 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
200. Bukti keluar kas No.2308177 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
201. Bukti keluar kas No.2308178 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
202. Bukti keluar kas No.3008277 tanggal 30 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
203. Bukti keluar kas No.3008278 tanggal 30 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
204. SPT Masa PPh Psl 23 masa September 2017 an. PTPN IX (Persero) PG. Pangkah dan lampiran 1 bendel s.d.a s.d.a
205. Bukti keluar kas No.1210108 tanggal 12 Oktober 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
206. Bukti masuk kas No.2308113 dan No.2308115 tanggal23 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
207. Bukti masuk kas No.2308114 dan No.2308116 tanggal23 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
208. Bukti masuk kas No.2308117 tanggal 23 Agustus2017 dan No.3008166 tanggal 30 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
209. Bukti masuk kas No.3008165 tanggal 30 Agustus2017 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 84 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

210. Daftar Pembayaran 1 lembar DWI ENGGAR NOVIANTO Rudi Hartono, Agung W, Mildan S
211. Daftar Faktur Pajak 1 lembar s.d.a s.d.a
212. Faktur Pajak 010.017-17.45771036 tgl 13/4/2017 buktikeluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
213. Faktur Pajak 010.017-17.45771033 tgl 16/3/2017 bukti keluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
214. Faktur Pajak 010.017-17.45771032 tgl 16/3/2017 bukti keluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
215. SPT Masa PPh 23(Jan, Maret, April, Sept) 2017 dan Jan 2018 5 bendel s.d.a s.d.a
216. Daftar Berkas CV. Asti Jaya th 2017-PG Mojo 1 Lembar KHOLIB YULIANTO Nurhayanto, Rudi Hartono, Mildan S
217. Perjanjian PT. Perkebunan Nusantara IX PG Mojo No. MJO/X/SPK/023/VI/2017 1 set s.d.a s.d.a
218. Faktur Pajak No. 010.017-17.45771059 1 lembar s.d.a s.d.a
219. Bukti Masuk Bank no. 0410003 1 lembar s.d.a s.d.a
220. Slip setoran rek 0038-0100139302 1 lembar s.d.a s.d.a
221. Bukti Transfer no. 2208002 1 lembar s.d.a s.d.a
222. Bukti keluar kas/bank no. 0410013 (Rp. 55.909.700) 1 lembar s.d.a s.d.a
223. Berita Acara penyerahan Pekerjaan No. BAPP/056/2017 1 set s.d.a s.d.a
224. Berita Acara penyerahan Fisik NO. BAPF/120/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
225. Perjanjian kerja No. MJO/X/SPK/022/VI/2017 1 set s.d.a s.d.a
226. Faktur Pajak No. 010.017-17.45771052 1 lembar s.d.a s.d.a
227. Bukti masuk bank No. 1810011 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
228. Bukti masuk kas/bank 1810012 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
229. Bukti masuk kas/bank 1810013 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
230. Bukti masuk kas/bank 1810014 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
231. Bukti masuk kas/bank 1810015 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
232. Bukti masuk kas/bank 1810016 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
233. Daftar bukti pemotongan PPh 23/26 1 lembar s.d.a s.d.a
234. Bukti penerimaan surat S-05054703/PPh23/WPJ.32/KP.0703/2017 tgl 09/11/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
235. Tanda terima setoran Pajak 765995879 1 lembar s.d.a s.d.a
236. Formulir setoran rekening tgl 10 Oktober 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
237. Bukti keluar kas/Bank atas pembayaran sewa traktor (1810012) 1 lembar s.d.a s.d.a
238. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810012) 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 85 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

239. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/047/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
240. Berita Acara penyerahan Fisik no. BAPF/111/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
241. Tagihan Penggunaan traktor traksi no. 01/VII/2017 1 set s.d.a s.d.a
242. Bukti keluar kas/ Bank atas pembayaran sewatraktor(1810013 1 lembar s.d.a s.d.a
243. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810013) 1 lembar s.d.a s.d.a
244. Berita Acara Penyerahan pekerjaan No. BAPP/048/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
245. Berita Acara penyerahan Fisik no. BAPF/112/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
246. Tagihan Penggunaan traktor traksi no. 02/VII/2017 1 set s.d.a s.d.a
247. Bukti keluar kas/bank no. 1810014 1 lembar s.d.a s.d.a
248. Kuitansi pembayaran biaya sewa (1810014) 1 lembar s.d.a s.d.a
249. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/049/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
250. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/113/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
251. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 03/VIII/2017 1 set s.d.a s.d.a
252. Bukti keluar kas/bank no. 1810015 1 lembar s.d.a s.d.a
253. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810015) 1 lembar s.d.a s.d.a
254. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/118/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
255. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/054/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
256. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 04/VIII/2017 1 set s.d.a s.d.a
257. Bukti keluar kas/bank no. 1810016 1 lembar s.d.a s.d.a
258. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa no. 1810016 1 lembar s.d.a s.d.a
259. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/065/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
260. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/129/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
261. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 05/IX/2017 1 set s.d.a s.d.a
262. Perjanjian Kerja No. MJO/X/SPK/022/VI/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
263. Bukti keluar kas/bank (1810117) 1 lembar s.d.a s.d.a
264. Kuitansi pembayaran biaya sewa (1810017) 1 lembar s.d.a s.d.a
265. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan noBAPP/077/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
266. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/141/2017 1 set s.d.a s.d.a

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa CV ASTI JAYA berdiri pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dengan susunan kepengurusan saat itu adalah ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur dan DWI PRASETIA FENDI sebagai Pesero Komanditer yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Wergu Wetan

Halaman 86 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 2 sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 15 Mei 2013, CV ASTI JAYA menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bidang perdagangan dan bidang jasa selain bidang hukum dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 77306 dari Wajib Pajak CV ASTI JAYA adalah Kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil.
- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan usaha diwakili oleh pengurus yaitu terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA yang memiliki tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan, serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan yang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga baik didalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Akta Notaris MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan komanditer.
- Bahwa sebagai badan usaha, CV ASTI JAYA telah terdaftar pada KPP Pratama Kudus sejak 10 Juni 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Nomor Pengukuhan : PEM-0868/WPJ.10/KP.0803/2013 sehingga selayaknya terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kudus;
- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 antara lain adalah melaporkan SPT PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CV ASTI JAYA telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian CV ASTI JAYA telah diberi

Halaman 87 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV ASTI JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan SPT PPH Tahunan maupun SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait, serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

- Bahwa kegiatan usaha yang CV ASTI JAYA pada tahun 2017 yaitu:

1. Menyewakan Louder kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. SRA/SPK/016/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
2. Menyewakan tractor kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017.
3. Pengadaan ampas Awur (ampas tebu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. TAS/SPK/025/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. SRA/SPK/025/2017 tanggal 24 September 2017.
4. Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017.
5. Menyewakan truk untuk mengangkut tebu kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017,
6. Pekerjaan pengurangan (Borrow Material) jalan tol di Pemalang – Batang paket 4 dengan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk di Gedung WASKITA Jalan MT HARYONO Kav. No. 10, Cawang, Jakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. 34/SPK-SUB/WK/PBRT.4/2017 tanggal 04 Maret 2017.
7. Menyewakan Esavator kepada PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO) di Subang akan tetapi Sewa tersebut tanpa ada perjanjian

Halaman 88 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



- dan SPK karena insidentil dan dibayar tunai;
8. Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan pabrik Gula PT LAJU PERDANA INDAH di Pati.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha CV ASTI JAYA tersebut, dokumen yang menyertai penjualan dan penyerahan jasa adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK), invoice, faktur pajak, Rekapitulasi Tagihan dan Bukti pembayaran (transfer/bukti pembayaran) dan Rekening yang digunakan untuk menampung hasil penjualan dan jasa CV ASTI JAYA pada tahun 2017:
 - Rekening BNI Cabang Kudus nomor 0503154461;
 - Bank Jateng Cabang Kudus nomor 1024005794 ;
 - BRI Cabang Kudus nomor 003801001735304
 - Bahwa atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV ASTI JAYA berupa penyewaan alat berat dan penjualan ampas tebu dan grajen sebagai bahan bakar ketel di pabrik gula kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH, CV ASTI JAYA menerbitkan Faktur keluaran menerbitkan faktur pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 dan memungut PPN sebesar 10% yaitu :

NO.	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	0100171745771 044	14-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	425.000
2	0300171745771 047	01-Jun-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	96.599.853
3	0300171745771 048	10-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5- 093.000	56.460.238
4	0100171745771 030	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	3.552.500
5	0100171745771 031	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2- 051.000	5.177.500
6	0100171745771 010	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.947.500
7	0100171745771 011	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.999.800
8	0100171745771 012	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	7.191.600
9	0100171745771 013	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
10	0100171745771 014	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.384.000
11	0100171745771 015	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.128.000
12	0100171745771 016	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.883.000
13	0100171745771 017	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0100171745771 018	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.384.000
15	0100171745771 019	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.014.600
16	0100171745771 020	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	633.000
17	0100171745771 021	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	558.000
18	0100171745771 022	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.111.800
19	0100171745771 023	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	781.800
20	0100171745771 024	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.582.800
21	0100171745771 025	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	972.600
22	0100171745771 026	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
23	0100171745771 027	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.985.000
24	0100171745771 028	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.567.500
25	0100171745771 029	'06-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	2.698.000
26	0100171745771 032	'16-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	14.926.250
27	0100171745771 033	'16-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	49.244.564
28	0100171745771 034	'16-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.612.000
29	0100171745771 035	'18-MAR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	28.933.350
30	0100171745771 036	'13-APR- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	35.965.959
31	0100171745771 040	'05-JUN- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	1.403.850
32	0100171745771 042	'09-JUN- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	4.404.960
33	0100171745771 045	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	10.499.600
34	0100171745771 046	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	37.326.750
35	0100171745771 049	'05-AUG- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	3.078.000
36	0100171745771 050	'05-AUG- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.258.550
37	0100171745771 052	'27-OCT- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	16.373.140
38	0100171745771 055	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	180.209.17
39	0100171745771 056	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	9.483.870
40	0100171745771 057	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	6.940.270
41	0100171745771 058	'10-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	36.024.000
42	0100171745771 060	'13-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	26.234.820
43	0100171745771 061	'13-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	22.077.056
44	'0110171745771 059	'16-NOV- 17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4- 051.000	5.082.700
45	0100171745771 054	06-NOV-17	LAJUPERDANA INDAH	01.571.859.6- 038.000	3.743.973

Halaman 90 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH	748.815.92
--------	------------

- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak keluaran, atas transaksi yang dilakukan CV ASTI JAYA juga menerima pajak masukan dari pihak lawan (pihak kedua yang melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No.	NOFA	TGFA	MSPJK	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_LWN
1	0100011724136455	01-MAR-17	201703	014460810511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.819.182
2	0100171782459266	12-APR-17	201704	014460810511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.851.000
3	0100171741937001	28-JUL-17	201707	027990571514000	GENDHIS MULTI MANIS	13.636.36
4	0100011747641558	01-AUG-17	201708	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
5	0100011747641559	09-SEP-17	201709	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
6	0100011747641562	01-NOV-17	201711	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
7	0100201772889127	23-NOV-17	201711	027990571514000	GENDHIS MULTI MANIS	7.158.036

- Bahwa setelah menerbitkan faktur pajak kewajiban CV ASTI JAYA selaku wajib pajak adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan jumlah faktur pajak yang dikeluarkan akan tetapi terdakwa selaku Direktur PT ASTI JAYA Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 yang sudah memungut pajak pada tahun 2017 tidak disetorkan ke Kas Negara oleh Terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku Direktur CV ASTI JAYA sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa menyetorkan Sebagian pajak yang dipungut pada tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut:

No.	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	November	9152A479QL1TO VG2	4112/11100	25.250.813	20-Mar-18
2	Oktober	F295A477SUL07B G2	4112/11100	16.373.140	20-Mar-18
3	Agustus	08C35476NVS1R 4G2	4112/11100	12.336.550	20-Mar-18
4	Juli	04975475IEF1VB	4112/111	47.826.350	20-Mar-18

Halaman 91 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		G2	00		
5	Juni	4452F4B3U4DNG	4112/111	1.403.850	20-Mar-18
		1G2	00		
6	April	32F484743SBB2B	4112/111	1.439.400	20-Mar-18
		G2	00		
7	Maret	5A9BC4736FN00	4112/111	94.120.000	20-Mar-18
		EG2	00		
8	Juli	4D42E3UDAV8KU	4112/119	56.460.238	15-Agu-17
		P7P	00		
9	Juni	466EA63SQ8Q8A	4112/119	96.599.853	17-Jul-17
		66P	00		
Jumlah				351.810.194	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor pajak yang telah dipungutnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp338.722.968,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Enam Delapan rupiah) sebagaimana Hasil pemeriksaan Ahli Penghitung Kerugian Negara dari KPP madya Semarang sebagai berikut:

URAIAN		MENURUT		KERUGIAN NEGARA (Rp)
		SPT/WP (Rp)	AHLI (Rp)	
PPN/PPn. BM				
PPN Dalam Negeri				
1	Eksport	0	0	
2	Peny. PPN-nya dipungut sendiri	0	7.488.159.250	7.488.159.2
3	Peny. PPN-nya digunggung	0	0	
4	Peny. PPN-nya dipungut Pemungut	0	0	
5	Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	
6	Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	
7	Return Penyerahan	0	0	
Jumlah Penyerahan		0	7.488.159.250	7.488.159.2
1	Pajak Keluaran PK dipungut Pemungut	0	748.815.925	748.815.9
2	PPN	0	0	
3	PPN atas Return Penyerahan	0	0	
Pajak Keluaran Harus Dipungut		0	748.815.925	748.815.9
1	Pajak Masukan Import	0	0	
2	Pajak Masukan Dalam Negeri	0	58.282.763	58.282.7
3	PM MTS Import	0	0	
4	PM MTS Dalam Negeri	0	0	
5	Return Pembelian	0	0	
6	Kompen. PPN Masa Sebelumnya	0	0	
7	Setoran	0	351.810.194	351.810.1
8	Lain-lain	0	0	

Halaman 92 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kredit Pajak	0	410.092.957	410.092.957
PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	338.722.968	338.722.968

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan analisa unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah manusia penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dihadirkan di persidangan seseorang bernama ASRI BUDI UTOMO yang membenarkan identitasnya di dalam surat dakwaan dan sudah dewasa sehingga mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

- Ad.2. Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mau dan mengetahui tidak menyetorkan pajak ke negara padahal Terdakwa telah memotongnya dari perbuatan Terdakwa dalam berbisnis yang mempunyai beban pajak yang harus disetor ke negara yaitu pajak pertambahan nilai;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa CV ASTI JAYA berdiri pada tanggal 15 Mei 2013 berdasarkan Akta Notari: MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan Komanditer CV ASTI JAYA dengan susunan kepengurusan saat itu adalah ASRI BUDI UTOMO sebagai Direktur dan DWI PRASETIA FENDI sebagai Pesero Komanditer yang berkedudukan di Jalan Patimura No. 6 Rt. 005 / RW. 004 Desa Wergu Wetar

Halaman 93 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Kudus Kabupaten Kudus.

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 angka 2 sebagaimana tersebut dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 15 Mei 2013, CV ASTI JAYA menjalankan usaha-usaha dalam bidang Pembangunan, bidang perdagangan dan bidang jasa selain bidang hukum dan berdasarkan administrasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Nomor 77306 dari Wajib Pajak CV ASTI JAYA adalah Kegiatan jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan Teknik sipil.
- Bahwa dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak badan usaha diwakili oleh pengurus yaitu terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA yang memiliki tugas dan wewenang mengurus semua urusan operasional perusahaan, serta mempunyai kekuasaan dan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan atas nama perusahaan yang mewakili dan mengikat Perseroan dimanapun juga baik didalam dan di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama perseroan melakukan segala perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Akta Notari: MUNZAROH Nomor : 01 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pendirian Perseroan komanditer.
- Bahwa sebagai badan usaha, CV ASTI JAYA telah terdaftar pada KPP Pratama Kudus sejak 10 Juni 2013 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9-506.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 10 Juni 2013 dengan Nomor Pengukuhan : PEM-0868/WPJ.10/KP.0803/2013 sehingga selayaknya terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku direktur CV ASTI JAYA mengetahui hak dan kewajiban yang melekat kepada pengurus perusahaan dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Kudus;
- Bahwa sesuai dengan sistem perpajakan di Indonesia yang menganut self assessment kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak setelah mendapatkan NPWP dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah memungut, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV ASTI JAYA NPWP 03.000.984.9-506.000 antara lain adalah melaporkan SPT PPh Tahunan maupun melaporkan SPT Masa PPN setiap bulan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan dalam pemungutan PPN;
- Bahwa setelah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, kepada CV ASTI JAYA telah diberikan nomor seri faktur pajak sehingga dengan demikian CV ASTI JAYA telah diber

Halaman 94 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaan oleh negara untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari pihak pembeli. Selanjutnya sebagai bukti atas pemungutan PPN tersebut CV ASTI JAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak atas setiap penyerahan barang/jasa kena pajak dengan nomor seri faktur pajak yang dimiliki dan melaporkan SPT PPH Tahunan maupun SPT Masa PPN setiap bulan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait serta menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas Negara sesuai mekanisme pemungutan PPN yang berlaku;

- Bahwa kegiatan usaha yang CV ASTI JAYA pada tahun 2017 yaitu:
 1. Menyewakan Louder kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. SRA/SPK/016/2017 tanggal 01 Agustus 2017;
 2. Menyewakan tractor kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017.
 3. Pengadaan ampas Awur (ampas tebu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. TAS/SPK/025/VII/2017 tanggal 04 Juli 2017, SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. SRA/SPK/025/2017 tanggal 24 September 2017.
 4. Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. REN/022/SPK/2017 tanggal 26 Mei 2017.
 5. Menyewakan truk untuk mengangkut tebu kepada PT PERKEBUNAN NUSANTARA (PT PN) IX yang beralamat di Jalan Ronggowarsito No. 164, Surakarta dengan SURAT PERJANJIAN KERJA (SPK) No. MJO/X/SPK/022/2017 tanggal 07 Juni 2017,
 6. Pekerjaan pengurangan (Borrow Material) jalan tol di Pemalang – Batang paket 4 dengan PT WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk di Gedung WASKITA Jalan MT HARYONO Kav. No. 10, Cawang, Jakarta dengan SURAT PERINTAH KERJA (SPK) No. 34/SPK-SUB/WK/PBRT.4/2017 tanggal 04 Maret 2017.
 7. Menyewakan Esavator kepada PABRIK GULA RAJAWALI I (PERSERO) di Subang akan tetapi Sewa tersebut tanpa ada perjanjian

Halaman 95 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan SPK karena insidentil dan dibayar tunai;
8. Pengadaan Saw Dust (Grajen kayu buat bahan bakar ketel) dengan pabrik Gula PT LAJU PERDANA INDAH di Pati.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan usaha CV ASTI JAYA tersebut dokumen yang menyertai penjualan dan penyerahan jasa adalah Surat Perjanjian Kerja (SPK), invoice, faktur pajak, Rekapitulasi Tagihan dan Bukti pembayaran (transfer/bukti pembayaran) dan Rekening yang digunakan untuk menampung hasil penjualan dan jasa CV ASTI JAYA pada tahun 2017:
 - Rekening BNI Cabang Kudus nomor 0503154461;
 - Bank Jateng Cabang Kudus nomor 1024005794 ;
 - BRI Cabang Kudus nomor 003801001735304
 - Bahwa atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh CV ASTI JAYA berupa penyewaan alat berat dan penjualan ampas tebu dan grajen sebagai bahan bakar ketel di pabrik gula kepada PT WASKITA KARYA (PERSERO Tbk, PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO), PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX (Persero), dan PT LAJUPERDANA INDAH, CV ASTI JAYA menerbitkan Faktur keluaran menerbitkan faktur pajak keluaran untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 dan memungut PPN sebesar 10% yaitu :

NO.	FAKTUR PAJAK		PEMBELI/PENERIMA JASA		PPN
	Nomor	Tanggal	NAMA WP	NPWP	
1	0100171745771044	14-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5-093.000	425.000
2	0300171745771047	01-Jun-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5-093.000	96.599.853
3	0300171745771048	10-Jul-17	WASKITA KARYA (PERSERO) Tbk	01.001.614.5-093.000	56.460.238
4	0100171745771030	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2-051.000	3.552.500
5	0100171745771031	07-Mar-17	PABRIK GULA RAJAWALI II (PERSERO)	01.001.644.2-051.000	5.177.500
6	0100171745771010	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.947.500
7	0100171745771011	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	4.999.800
8	0100171745771012	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	7.191.600
9	0100171745771013	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.985.000
10	0100171745771014	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	6.384.000
11	0100171745771015	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	2.128.000
12	0100171745771016	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	4.883.000
13	0100171745771017	06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.985.000

Halaman 96 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		17	NUSANTARA IX	051.000	
14	0100171745771018	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	6.384.000
15	0100171745771019	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	4.014.600
16	0100171745771020	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	633.000
17	0100171745771021	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	558.000
18	0100171745771022	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	1.111.800
19	0100171745771023	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	781.800
20	0100171745771024	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	4.582.800
21	0100171745771025	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	972.600
22	0100171745771026	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.985.000
23	0100171745771027	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.985.000
24	0100171745771028	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	1.567.500
25	0100171745771029	'06-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	2.698.000
26	0100171745771032	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	14.926.250
27	0100171745771033	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	49.244.564
28	0100171745771034	'16-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	6.612.000
29	0100171745771035	'18-MAR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	28.933.350
30	0100171745771036	'13-APR-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	35.965.959
31	0100171745771040	'05-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	1.403.850
32	0100171745771042	'09-JUN-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	4.404.960
33	0100171745771045	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	10.499.600
34	0100171745771046	'01-JUL-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	37.326.750
35	0100171745771049	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	3.078.000
36	0100171745771050	'05-AUG-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	9.258.550
37	0100171745771052	'27-OCT-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	16.373.140
38	0100171745771055	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	180.209.172
39	0100171745771056	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	9.483.870
40	0100171745771057	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	6.940.270
41	0100171745771058	'10-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	36.024.000
42	0100171745771060	'13-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	26.234.820
43	0100171745771061	'13-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	22.077.056
44	'0110171745771059	'16-NOV-17	PERKEBUNAN NUSANTARA IX	01.061.137.4-051.000	5.082.700
45	0100171745771054	06-NOV-	LAJUPERDANA	01.571.859.6-	3.743.973

Halaman 97 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17	INDAH	038.000	
JUMLAH				748.815.925

- Bahwa selain menerbitkan faktur pajak keluaran, atas transaksi yang dilakukan CV ASTI JAYA juga menerima pajak masukan dari pihak lawan (pihak kedua yang melakukan transaksi dengan CV ASTI JAYA untuk masa pajak Januari 2017 s.d. Desember 2017 sebagai berikut:

No.	NOFA	TGFA	MSPJK	NPWP_LWN	NAMA_LWN	PPN_LWN
1	0100011724136455	01-MAR-17	201703	014460810511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.819.182
2	0100171782459266	12-APR-17	201704	014460810511000	KARYA ZIRANG UTAMA	7.851.000
3	0100171741937001	28-JUL-17	201707	027990571514000	GENDHIS MULTI MANIS	13.636.364
4	0100011747641558	01-AUG-17	201708	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
5	0100011747641559	09-SEP-17	201709	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
6	0100011747641562	01-NOV-17	201711	746822972503000	SEKAR BUMI PARAMA	7.272.727
7	0100201772889127	23-NOV-17	201711	027990571514000	GENDHIS MULTI MANIS	7.158.036

- Bahwa setelah menerbitkan faktur pajak kewajiban CV ASTI JAYA selaku wajib pajak adalah menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sesuai dengan jumlah faktur pajak yang dikeluarkan akan tetapi terdakwa selaku Direktur PT ASTI JAYA Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.000.984.9506.000 yang sudah memungut pajak pada tahun 2017 tidak disetorkan ke Kas Negara oleh Terdakwa ASRI BUDI UTOMO selaku Direktur CV ASTI JAYA sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa menyetorkan Sebagian pajak yang dipungut pada tahun 2017 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Masa	No. NTPP	MAP/KJS	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
1	November	9152A479QL1T OVG2	4112/11100	25.250.813	20-Mar-18
2	Oktober	F295A477SUL0 7BG2	4112/11100	16.373.140	20-Mar-18
3	Agustus	08C35476NVS1 R4G2	4112/11100	12.336.550	20-Mar-18
4	Juli	04975475IEF1V BG2	4112/11100	47.826.350	20-Mar-18

Halaman 98 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Juni	4452F4B3U4DN G1G2	4112/11 100	1.403.850	20-Mar-18
6	April	32F484743SBB 2BG2	4112/11 100	1.439.400	20-Mar-18
7	Maret	5A9BC4736FN0 0EG2	4112/11 100	94.120.00 0	20-Mar-18
8	Juli	4D42E3UDAV8 KUP7P	4112/11 900	56.460.23 8	15-Agu-17
9	Juni	466EA63SQ8Q 8A66P	4112/11 900	96.599.85 3	17-Jul-17
Jumlah				351.810.1 94	

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak menyetor pajak yang telah dipungutnya tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp338.722.968,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Enam Delapan rupiah) sebagaimana Hasil pemeriksaan Ahli Penghitung Kerugian Negaradar KPP madya Semarang sebagai berikut :

URAIAN		MENURUT		KE NEG
		SPT/WP (Rp)	AHLI (Rp)	
PPN/PPn. BM				
PPN Dalam Negeri				
1	Eksport	0	0	
2	Peny. PPN-nya dipungut sendiri	0	7.488.159.250	7.4
3	Peny. PPN-nya digunggung	0	0	
4	Peny. PPN-nya dipungut	0	0	
5	Pemungut	0	0	
6	Peny. PPN-nya tidak dipungut	0	0	
7	Penyerahan Dibebaskan PPN	0	0	
8	Return Penyerahan	0	0	
Jumlah Penyerahan		0	7.488.159.250	7.4
1	Pajak Keluaran	0	748.815.925	7.
2	PK dipungut Pemungut	0	0	
3	PPN	0	0	
4	PPN atas Return	0	0	
5	Penyerahan	0	0	
Pajak Keluaran Harus Dipungut		0	748.815.925	7.
1	Pajak Masukan Import	0	0	
2	Pajak Masukan Dalam Negeri	0	58.282.763	
3	PM MTS Import	0	0	
4	PM MTS Dalam Negeri	0	0	
5	Return Pembelian	0	0	
6	Kompen. PPN Masa Sebelumnya	0	0	
7	Setoran	0	351.810.194	3.

Halaman 99 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



8	Lain-lain	0	0	
	Jumlah Kredit Pajak	0	410.092.957	4
	PPN ymh. (Lebih) Dibayar	0	338.722.968	3

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara' terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf i UU 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan UU 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi dan tidak terdapat alasan pembenar dan pemaaf pada Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua sehingga harus menjalani pidana penjara dan denda sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harta kekayaan Terdakwa akan dilelang dan apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dokumen-dokumen maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penerimaan negara yang tidak dibayarkan atau kerugian negara sebesar Rp338.722.968,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Dua ribu Sembilan Ratus Enam Delapan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap anak (4) yang masih sekolah;
- Usaha Terdakwa mengalami kemunduran dan kehancuran;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang 6 Tahun 1983 yang telah diubah dan ditambah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Asri Budi Utomo** oleh karena itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda Menjatuhkan pidana Denda sebanyak 2 X Nilai Kerugian Negara ($2 \times \text{Rp. } 338.722.968 = 677.445.936,-$ (*enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*)) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar Denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan atas nama CV. ASTI JAYA tahun pajak 2017
 2. ordner DWI HERMAWAN WICAKSONO Nurhayanto, RudiHartono, Mildan S2.
 3. Berkas Induk Wajib Pajak (cetakan) yang terdiri dari:
 - a. Surat keterangan terdaftar
 - b. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
 - c. Permohonan Pengukuhan PKP
 - d. Tanda Daftar perusahaan PersekutuanKomanditer .

Halaman 101 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



- Halaman 102 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



22. Faktur pajak no. 010-017-17.45771029 1 lembar s.d.a s.d.a
23. Faktur pajak no. 010-017-17.45771034 1 lembar s.d.a s.d.a
24. Faktur pajak no. 010-017-17.45771045 1 lembar s.d.a s.d.a
25. Faktur pajak no. 010-017-17.45771048 1 lembar s.d.a s.d.a
26. Faktur pajak no. 010-017-17.45771049 1 lembar s.d.a s.d.a
27. Faktur pajak no. 010-017-17.45771050 1 lembar s.d.a s.d.a
28. Faktur pajak no. 010-017-17.45771056 1 lembar s.d.a s.d.a
29. Faktur pajak no. 010-017-17.45771057 1 lembar s.d.a s.d.a
30. Faktur pajak no. 010-017-17.45771058 1 lembar s.d.a s.d.a
- Dokumen PG. TASIK MADU KRA
31. Fotokopi Rekapitulasi Fajak Masukan 2 lembar s.d.a s.d.a
32. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010008 dan kuitasi pembayaran no.24010008 2 lembar s.d.a s.d.a
33. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 1 ags sd 15 agt 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
34. Fotokopi Rekapam jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 1 lembar s.d.a s.d.a
35. Fotokopi Srt perjanjian kerja no. TAS/SPK/078/VII/2016 1 set s.d.a s.d.a
36. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010009 dan kuitasi pembayaran no.24010009 3 lembar s.d.a s.d.a
37. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 16/8 sd 31/08/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
38. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010010 dan kuitasi pembayaran no.24010010 2 lembar s.d.a s.d.a
39. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 01/9 sd 15/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
40. Fotokopi Rekapam jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 01/9 sd 15/9/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
41. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010011 dan kuitasi pembayaran no.24010011 2 lembar s.d.a s.d.a
42. Fotokopi Rekapam jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 16/09 sd 30/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
43. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 16/09 sd 30/09/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
44. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010012 dan kuitasi pembayaran no.24010012 3 lembar s.d.a s.d.a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotokopi Rekapan jam kerja traktor tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016 01/10 sd 15/10/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
46. Fotokopi Perhitungan biaya Tarik lori(TAS/SPK/078/VII/2016) 01/10 sd 15/10/2016 1 lembar s.d.a s.d.a
47. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010013 dan kuitasi pembayaran no.24010013 2 lembar s.d.a s.d.a
48. Fotokopi Absensi traktor periode 16 s/d 30 sep 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
49. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (24010013) 1 lembar s.d.a s.d.a
50. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501005 dan bukti tranfer no 0501005 2 lembar s.d.a s.d.a
51. Fotokopi Absensi traktor periode 16 s/d 31 ags 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
52. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010005) 1 lembar s.d.a s.d.a
53. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501004 dan bukti tranfer no 0501004 2 lembar s.d.a s.d.a
54. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 sep 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
55. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010004) 1 lembar s.d.a s.d.a
56. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.0501006 dan bukti tranfer no 0501006 2 lembar s.d.a s.d.a
57. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 ags 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
58. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (05010006) 1 lembar s.d.a s.d.a
59. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010007 dan kuitasi pembayaran no 24010007 2 lembar s.d.a s.d.a
60. Fotokopi Absensi traktor periode 1 s/d 15 Okt 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
61. Fotokopi Biaya Acara Pemakaian traktor (2401007) 1 lembar s.d.a s.d.a
62. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.10020001 danKuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
63. Fotokopi Berita Acara Pemakaian LoaderNo.10020001 1 lembar s.d.a s.d.a
64. Fotokopi Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 1Oktober s/d 15 Okt 2016 No.10020001 1 lembar s.d.a s.d.a
65. Fotokopi Bukti transfer No. 10020001 pembayaran loader 1-15 Okt 16 dari PG Tasikmadu ke CV Asti Jaya 1 lembar s.d.a s.d.a
66. Fotokopi Bukti Keluar Kas/Bank No.10020000 danKuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
67. Fotokopi Berita Acara Pemakaian LoaderNo.10020000 1 lembar s.d.a s.d.a
68. Fotokopi Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 16Oktober s/d 31 Okt 2016 No.10020000 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 104 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Fotokopi Bukti Penerimaan Surat SPT PPh Pasal 23/26 No. S-01010605/PPH23/WPJ.32/KP.0703/2017 tanggal 14-03-2017, Bukti Penerimaan Negara NTPN273F22BLGVU3JGA1, dan SPT PPh Pasal 23/26 Masa 02/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
70. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010000 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
71. Fotokopi Bukti transfer No. 05010000 pembayaran loader 1-15 Juli 16 dari PG Tasikmadu ke Asri Budi Utomo 1 lembar s.d.a s.d.a
72. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.05010000 1 lembar s.d.a s.d.a
73. Fotokopi Absensi Operator Loader Tanggal 16 Juni s/d 30 Juni 2016 No. 05010000 1 lembar s.d.a s.d.a
74. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat No.TAS/SPK/020/IV/2016 tanggal 12 April 2016 1 set s.d.a s.d.a
75. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010001 dan Kuitansi Pembayaran 1 lembar s.d.a s.d.a
76. Fotokopi Bukti transfer No. 05010001 pembayaran loader 16-31 Juli 16 dari PG Tasikmadu ke Asri Budi Utomo 1 lembar s.d.a s.d.a
77. Fotokopi Berita Acara Pemakaian Loader No.05010001 1 lembar s.d.a s.d.a
78. Fotokopi Absensi Operator Loader Tanggal 16 Juli s/d 31 Juli 2016 No. 05010001 1 lembar s.d.a s.d.a
79. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat No.TAS/SPK/020/IV/2016 tanggal 12 April 2016 1 set s.d.a s.d.a
80. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010004 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln Agustus TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
81. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010003 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln Agustus TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
82. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.08030005, kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader, Bukti Transfer, SPT PPh Pasal 23/26 Masa 3/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
83. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010005 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Loader Bln September TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 105 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010002 dan Kuitansi pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Louder 1 s.d. 15 Agustus 2016, Berita Acara Pemakaian Loader 1 set s.d.a s.d.a
85. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.24010006 dan Bukti Transfer Pembayaran Sewa Louder Bulan September TAS/SPK/020/IV/2016, Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader Tanggal 16 September s/d 30 September 2016 1set s.d.a s.d.a
86. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.05010003 dan Kuitansi pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Louder 16 s.d. 31 Agustus 2016, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader 1set s.d.a s.d.a
87. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100000 dan Kuitansi Pembayaran, Bukti Transfer Pembayaran Sewa Louder, Absensi Traktor, Berita Acara Pemakaian Traktor; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100001 dan Kuitansi Pembayaran, Absensi Traktor, Berita Acara Pemakaian Traktor, SPT PPh Pasal 23/26 Masa10/2017 a.n. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
88. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100003 s.d. No.28100009 1 set s.d.a s.d.a
89. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100002 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100003 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100004 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100005 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100006 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader; Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.28100007 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Pemakaian Loader, Rekapitulasi Pemakaian Loader. 1 set s.d.a s.d.a
90. Fotokopi Bukti keluar kas/bank No.31870053 dan Kuitansi pembayaran, Berita Acara Muat, Angkut dan Bongkar Ampas Awul, Rekap Penerimaan Ampas Awul, Rekap Awul, Surat Perjanjian Kerja No. TAS/SPK/025/VII/2017, SPT PPh Pasal 23/26 Masa7/2017 an. PTPN IX PG Tasikmadu 1 set s.d.a s.d.a
91. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Tebu di Emplasemen Untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 20 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 106 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Muat, Angkut dan Bingkar Muat Amplas Awul PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 1 set s.d.a s.d.a
93. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Gula SHS Stamlor ke Gudang Penyimpanan untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 06 Juli 2017 1 set s.d.a s.d.a
94. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Tebu di Emplasemen Untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2016 No.TAS/SPK/028/VI/2016 tanggal 28 Mei 2016 1 set s.d.a s.d.a
95. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Alat Berat Loader (ALL IN) Jam Operasional 4 Jam Stand By (Setiap hari) untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2017 tanggal 03 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
96. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sewa Traktor Untuk Menarik Lori Gula SHS Stamlor ke Gudang Penyimpanan untuk Giling PG Tasikmadu Tahun 2016 No.TAS/SPK/078/VI/2016 tanggal 21 Juli 2016 1 set s.d.a s.d.a
97. Faktur Pajak (PK)010.017-17.457771035 tgl 18/3/2017 1 lembar MUKTI TISNAWATI, SE Nurhayanto, Budhi S, Moestakim
98. Faktur Pajak (PK)010.017-17.457771040 tgl 05/6/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
99. Rincian pembayaran saw dust dan pembayaran sewa traktor 1 lembar s.d.a s.d.a
100. Bukti pengeeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 16 okt sd 02 des dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
101. SPT Masa PPh 23 Masa maret 2017 1 set s.d.a s.d.a
102. Bukti pengeeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 11 sd 15 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
103. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 sd 15 sep dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
104. Bukti pengeeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 1 sd 10 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
105. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 sd 10 sep dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
106. Bukti pengeeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 21 sd 31 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
107. Bukti transfer atas pembayaran sewa 21 sd 31 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
108. Bukti pengeeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 11 sd 20 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
109. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 sd 20 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 107 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor per 1 sd 10 ags dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
111. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 sd 10 ags dan faktur pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
112. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya 21 sd 31 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
113. Bukti transfer atas pembayaran sewa 21 Juli sd 31 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
114. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 11 sd 20 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
115. Bukti transfer atas pembayaran sewa 11 Juli sd 20 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
116. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 1 sd 10 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
117. Bukti transfer atas pembayaran sewa 1 Juli sd 10 Jul dan faktur Pajaknya 1 set s.d.a s.d.a
118. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya periode 1 sd 10 juli 1 bendel s.d.a s.d.a
119. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewatraktor dan bukti pendukung lainnya periode 13 sd 20 jun 1 bendel s.d.a s.d.a
120. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sewa traktor dan bukti pendukung lainnya periode 03 sd 12 jun 1 bendel s.d.a s.d.a
121. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust sesuai SP-REN/SPK.018/2015 ; 25 mei 2017 dan bukti pendukung lainnya ,faktur 010.17-17.45771060 1 bendel s.d.a s.d.a
122. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 10 &11 Juni 2017 dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
123. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 10 & 11Juni 1 lembar s.d.a s.d.a
124. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust tgl 17 &20 Agustus 2017 dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
125. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran sawdust tgl 31 Agustus 2017 dan 10 sept dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
126. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 31 Agst sd 10 sep 1 lembar s.d.a s.d.a
127. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 08,09,dan 11 juni dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a

Halaman 108 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 08,09, 11Juni 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
129. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 25 Mei & 21 juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
130. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 25 Mei & 21 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
131. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 19 ,20 juni 2017 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
132. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 28 mei,17 ,18 juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
133. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 mei, 1 bendel s.d.a s.d.a
134. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 25 mei,dan 13 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
135. Bukti transfer atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei & 13 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
136. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 12 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
137. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 8 juni 1 bendel s.d.a s.d.a
138. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 8 juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
139. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
140. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 26 Mei 2017 1 set s.d.a s.d.a
141. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 06 Juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
142. Bukti transfer atas pembayaran saw dust 06 Juni 2017 1 set s.d.a s.d.a
143. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 03 Juni 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
144. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 sebanyak 97300kg x 285,- 1 bendel s.d.a s.d.a
145. Bukti pengeluaran kas/bank atas pembayaran saw dust tgl 26 Mei 2017 sebanyak 95750kg x 285,- 1 bendel s.d.a s.d.a
146. Pembayaran piutang 1 set ASRI BUDI UTOMO Nurhayanto,BudhiSuryanto,Moestakim
147. Rekening BNI Plus 0813900032 1 bendel s.d.a s.d.a
148. Rekening BCA no 0312533357 1 bendel s.d.a s.d.a
149. Rekening BNI cab Kudus 0503154461 1 set s.d.a s.d.a
150. Rek bank jateng 1024005794 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 109 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. SPT Tahunan 2017 dan SPT Masa PPh dan PPN 1 bendel s.d.a s.d.a
152. Bukti invoice PT. Barata Indonesia dan bukti pendukung lainnya 1 bendel s.d.a s.d.a
153. Akte pendirian Perusahaan 1 bendel s.d.a s.d.a
154. Surat perjanjian kerja muat angkut dan bongkar muat ampas awul PT Tasikmadu th 2017 1 bendel s.d.a s.d.a
155. Surat Perjanjian Kerja (SPK) no. SR.A/SPK/016/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
156. Surat Perjanjian Kerja PG Sragi No. SRA/SPK/025/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
157. Surat perjanjian kerja PG Mojo Sragen dgn CV. ASTI Jaya No. MJO/X/SPK/022/VI/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
158. Surat perjanjian Kerja dengan PG. Rendeng No. REN/022/SPK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
159. Surat perjanjian kerja dengan PG Tasikmadu no. Tas/SPK/024/VII/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
160. Surat Perjanjian kerja dengan PG. Rendeng No. REN/044/SpK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
161. Surat Perjanjian kerja dengan PG. Rendeng No. REN/023/SpK/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
162. Outstanding piutang cv Asti Jaya dan rekap tagihan 1 set s.d.a s.d.a
163. Surat Perjanjian angkutan tebu dgn PG Pangka no. PAN /SPK/018/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
164. Surat Perjanjian kerja sewa alat berat loader PG Tasikmadu 1 bendel s.d.a s.d.a
165. Surat Perintah Kerja No. 34/SPK- SUB/WK/PBTR.4/2017 1 bendel s.d.a s.d.a
166. Surat pemeritahuan No. 522/BLR-DO/LT-A/IX/2018 1 set s.d.a s.d.a
167. Tagihan ke tiga puluh ampas ampas pg trangkil pati No. 76/KEU/05/2021 1 set s.d.a s.d.a
168. Outsanding kewajiban No. 313/AJ/XII/2019 1 set s.d.a s.d.a
169. Info Jatuh tempo an CV Asti Jaya 1 set s.d.a s.d.a
170. Persetujuan Permohonan Kredit 1 set s.d.a s.d.a
171. Surat Peringatan I & II dari BRI 1 set s.d.a s.d.a
172. Buku Tanah no 5975747 1 bendel s.d.a s.d.a
173. Sertifikat tanah No. 2670 th 1981 1 set s.d.a s.d.a
174. Sertifikat hak mili no. 3553 1 set s.d.a s.d.a
175. Surat ukur no. 77/Prbn/2002 1 set s.d.a s.d.a
176. Surat ukur no. 255/wergu wetan/2005 1 set s.d.a s.d.a

Halaman 110 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177. In house transfer (Nilai pembayaran) 1 lembar HERRY RISWANDI Rudi Hartono,AgungW,Mildan S
178. SPK NO.41480-HJ/PESWA/16.169/SPK tanggal 11November 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
179. Berita Acara Penerimaan Barang-Bahan-Pekerjaan41480-HJ/PESWA/17.0089 1 lembar s.d.a s.d.a
180. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Excavator Periode23 November s.d. Desember 2017 beserta lampiran time sheet 1 set s.d.a s.d.a
181. Invoice No.INV02032017 Tanggal 7-Mar-17 1 lembar s.d.a s.d.a
182. Faktur Pajak No.010.017-17.45771031 tanggal 07Maret 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
183. Kuitansi No.KW02032017 1 lembar s.d.a s.d.a
184. Bukti keluar kas/bank pembayaran sewa dan PPN No.TUK170313-0025 1 lembar s.d.a s.d.a
185. Bukti Masuk kas/bank atas PPh Pasal 23No.TUK170313-0045 1 lembar s.d.a s.d.a
186. SPK NO.41480-HJ/PESWA/16.180/SPK tanggal 27Desember 2016 1 lembar s.d.a s.d.a
187. Berita Acara Penerimaan Barang-Bahan-Pekerjaan41480-HJ/PESWA/17.0103 1 lembar s.d.a s.d.a
188. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan Excavator Periode24 Desember 2016 s.d. 29 Januari 2017 beserta lampiran time sheet 1 set s.d.a s.d.a
189. Invoice No.INV01032017 Tanggal 7-Mar-17 1 lembar s.d.a s.d.a
190. Faktur Pajak No.010.017-17.45771030 tanggal 07Maret 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
191. Kuitansi No.KW01032017 1 lembar s.d.a s.d.a
192. Bukti keluar kas/bank pembayaran sewa dan PPN No.TUK170313-0024 1 lembar s.d.a s.d.a
193. Bukti Masuk kas/bank atas PPh Pasal 23No.TUK170313-0044 1 lembar s.d.a s.d.a
194. Surat Perjanjian PAN/SPK/018/2017 1 bendel AHMAD JUHRI Rudi hartono,AgungWidarta,Mildan S
195. Faktur Pajak no.010.017-17.45771055 tgl 10/11/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
196. Surat Kuasa ASRI BUDI UTOMO kepada M. SOLAIMAN tanggal 17 Juli 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
197. Bukti keluar kas No.2308174 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 111 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. Bukti keluar kas No.2308175 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
199. Bukti keluar kas No.2308176 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
200. Bukti keluar kas No.2308177 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
201. Bukti keluar kas No.2308178 tanggal 23 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
202. Bukti keluar kas No.3008277 tanggal 30 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
203. Bukti keluar kas No.3008278 tanggal 30 Agustus 2017 dan kuitansi 1 lembar s.d.a s.d.a
204. SPT Masa PPh Psl 23 masa September 2017 an. PTPN IX (Persero) PG. Pangkah dan lampiran 1 bendel s.d.a s.d.a
205. Bukti keluar kas No.1210108 tanggal 12 Oktober 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
206. Bukti masuk kas No.2308113 dan No.2308115 tanggal 23 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
207. Bukti masuk kas No.2308114 dan No.2308116 tanggal 23 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
208. Bukti masuk kas No.2308117 tanggal 23 Agustus 2017 dan No.3008166 tanggal 30 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
209. Bukti masuk kas No.3008165 tanggal 30 Agustus 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
210. Daftar Pembayaran 1 lembar DWI ENGGAR NOVIANTO Rudi Hartono, Agung W, Mildan S
211. Daftar Faktur Pajak 1 lembar s.d.a s.d.a
212. Faktur Pajak 010.017-17.45771036 tgl 13/4/2017 bukti keluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
213. Faktur Pajak 010.017-17.45771033 tgl 16/3/2017 bukti keluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
214. Faktur Pajak 010.017-17.45771032 tgl 16/3/2017 bukti keluar bank, Kuitansi SPK 1 bendel s.d.a s.d.a
215. SPT Masa PPh 23(Jan, Maret, April, Sept) 2017 dan Jan 2018 5 bendel s.d.a s.d.a
216. Daftar Berkas CV. Asti Jaya th 2017-PG Mojo 1 Lembar KHOLIB YULIANTO Nurhayanto, Rudi Hartono, Mildan S
217. Perjanjian PT. Perkebunan Nusantara IX PG Mojo No. MJO/X/SPK/023/VI/2017 1 set s.d.a s.d.a
218. Faktur Pajak No. 010.017-17.45771059 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 112 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219. Bukti Masuk Bank no. 0410003 1 lembar s.d.a s.d.a
220. Slip setoran rek 0038-0100139302 1 lembar s.d.a s.d.a
221. Bukti Transfer no.2208002 1 lembar s.d.a s.d.a
222. Bukti keluar kas/bank no. 0410013 (Rp. 55.909.700) 1 lembar s.d.a s.d.a
223. Berita Acara penyerahan Pekerjaan No.BAPP/056/2017 1 set s.d.a s.d.a
224. Berita Acara penyerahan Fisik NO. BAPF/120/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
225. Perjanjian kerja No. MJO/X/SPK/022/VI/2017 1 set s.d.a s.d.a
226. Faktur Pajak No. 010.017-17.45771052 1 lembar s.d.a s.d.a
227. Bukti masuk bank No. 1810011 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
228. Bukti masuk kas/bank 1810012 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
229. Bukti masuk kas/bank 1810013 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
230. Bukti masuk kas/bank 1810014 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
231. Bukti masuk kas/bank 1810015 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
232. Bukti masuk kas/bank 1810016 atas pembayaran PPh23 1 lembar s.d.a s.d.a
233. Daftar bukti pemotongan PPh 23/26 1 lembar s.d.a s.d.a
234. Bukti penerimaan surat S-05054703/PPh23/WPJ.32/KP.0703/2017 tgl 09/11/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
235. Tanda terima setoran Pajak 765995879 1 lembar s.d.a s.d.a
236. Formulir setoran rekening tgl 10 Oktober 2017 1 lembar s.d.a s.d.a
237. Bukti keluar kas/Bank atas pembayaran sewa traktor (1810012) 1 lembar s.d.a s.d.a
238. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810012) 1 lembar s.d.a s.d.a
239. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/047/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
240. Berita Acara penyerahan Fisik no. BAPF/111/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
241. Tagihan Penggunaan traktor traksi no. 01/VII/2017 1 set s.d.a s.d.a
242. Bukti keluar kas/ Bank atas pembayaran sewatraktor(1810013 1 lembar s.d.a s.d.a
243. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810013) 1 lembar s.d.a s.d.a
244. Berita Acara Penyerahan pekerjaan No. BAPP/048/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
245. Berita Acara penyerahan Fisik no. BAPF/112/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
246. Tagihan Penggunaan traktor traksi no. 02/VII/2017 1 set s.d.a s.d.a
247. Bukti keluar kas/bank no. 1810014 1 lembar s.d.a s.d.a
248. Kuitansi pembayaran biaya sewa (1810014) 1 lembar s.d.a s.d.a
249. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/049/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
250. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/113/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
251. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 03/VIII/2017 1 set s.d.a s.d.a
252. Bukti keluar kas/bank no. 1810015 1 lembar s.d.a s.d.a

Halaman 113 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

253. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa (1810015) 1 lembar s.d.a s.d.a
254. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/118/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
255. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/054/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
256. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 04/VIII/2017 1 set s.d.a s.d.a
257. Bukti keluar kas/bank no. 1810016 1 lembar s.d.a s.d.a
258. Kuitansi pembayaran atas biaya sewa no. 1810016 1 lembar s.d.a s.d.a
259. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan No. BAPP/065/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
260. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/129/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
261. Tagihan penggunaan Traktor Traksi No. 05/IX/2017 1 set s.d.a s.d.a
262. Perjanjian Kerja No. MJO/X/SPK/022/VI/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
263. Bukti keluar kas/bank (1810117) 1 lembar s.d.a s.d.a
264. Kuitansi pembayaran biaya sewa (1810017) 1 lembar s.d.a s.d.a
265. Berita Acara Penyerahan Pekerjaan noBAPP/077/2017 1 lembar s.d.a s.d.a
266. Berita Acara Penyerahan Fisik No. BAPF/141/2017 1 set s.d.a s.d.a

terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H., dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus, serta dihadiri oleh Haris Abdur Rohman Ibawi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.
Ziyad, S.H., M.H.

Ttd.
Wiyanto, S.H., M.H.

Ttd.
Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 114 dari 115 halaman Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Kds

